

**TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PENYALURAN BERAS  
MISKIN (RASKIN) DI DESA RARAMPADENDE KECAMATAN DOLO  
BARAT KABUPATEN SIGI**



**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada  
Jurusan Ekonomi Syariah (ESY) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu*

Oleh

SRI WAHYUNI  
NIM:15.3.12.0096

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU  
TAHUN 2019**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi dengan judul “TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PENYALURAN RASKIN DI DESA RARAMPADENDE KECAMATAN DOLO BARAT KABUPATEN SIGI” benar adalah hasil karya penyusun sendiri, jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Palu, 14 April 2019  
9 Syaban 1440

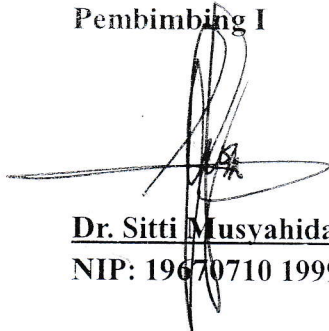
SRI WAHYUNI  
NIM. 15.3.12.0096

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penyaluran Raskin di Desa Rarampadende Kecamatan Dolo Barat Kab. Sigi, Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palu. Setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk di ajukan di ujian tutup.

Palu, 14 April 2019 M  
9 Sya'ban 1440 H

Pembimbing I



Dr. Sitti Musyahida, M.T.h.I  
NIP: 19670710 199903 2 0005

Pembimbing II



Fadliyah Mubakkirah, S.H.I, M.H.I  
NIP: 19830311 201503 2 002

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu



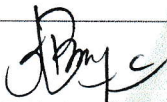
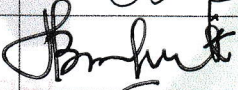


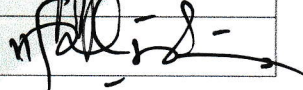
Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I  
NIP. 19650505 199903 1 002

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudari Sri Wahyuni NIM: 15.3.12.0096 dengan Judul “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penyaluran Beras Miskin (Raskin) di Desa Rarampadende Kecamatan Dolo Barat Kabupaten Sigi”, yang telah diujikan dihadapan dewan penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu pada tanggal dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Jurusan Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.

Palu, 21 Juni 2019 M  
17 Syawal 1440 H

### DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Dr. Ermawati, S.Ag., M.Ag	
Munaqisy 1	Dr. H. Sofyan Bachmid, S.Pd. M.M	
Munaqisy 2	Nursyamsu, S.H.I., M.S.I	
Pembimbing 1	Dr. Sitti Musyahida, M.Th.I	
Pembimbing 2	Fadliah Mubakkirah, S.H.I,M.H.I	

*Mengetahui :*

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I**  
NIP: 19650505 199903 2 002

Ketua  
Jurusan Ekonomi Syariah

**Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I**  
NIP: 19370331 200312 2 002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاة والسلام على

اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد

Alhamdulillah segala puji bagi Allah swt atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “ Tinjauan Ekonomi Terhadap Penyaluran Beras Miskin (RASKIN) di Desa Rarampadende Kecamatan Dolo Barat Kabupaten Sigi”. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw, beserta segenap keluarga dan sahabatnya yang telah mewariskan berbagai macam hukum sebagai pedoman umatnya.

Penulis menyadari bahwa di dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan, perhatian dan pengarahan. maka penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Ayahanda tercinta Mustamin Laugu dan Ibunda Ajerni Lamampasi yang telah membesarkan, mendidik, mendoakan, dan member kesempatan kepada penulis untuk belajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palu serta membiayai penulis dalam kegiatan studi dari jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf Petalongi M.Ag, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, Bapak Dr. H. Abidin, M.Ag, selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Dan Pengembangan Kelembagaan Intitut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, Bapak Dr. H. Kamarudin M.Ag, selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum Perencanaan Dan Keuangan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, Bapak Drs. H. Iskandar, M.Sos.I, selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Dan Kerjasama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu.

3. Bapak Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, dan Bapak H. Nurdin, S.Pd., S.Sos., M. Com., Ph.D, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Kemahasiswaan, Kelembagaan dan Kerjasama FEBI IAIN Palu, dan Ibu Dr. Hj. Ermawati, S.Ag., M.Ag., selaku Wakil dekan bidang Administrasi Umum Perencanaan & Keuangan FEBI IAIN Palu yang telah memberikan izin penulis untuk belajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan memotivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik.
4. Ibu Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah dan Bapak Nursyam, S.H.I, M.H.I selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah yang selalu meluangkan waktunya kepada penulis, memberikan nasehat dan mengarahkan penulis dalam proses belajar.
5. Ibu Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I, selaku Pembimbing I, dan Ibu Fadliah Mubakkirah, S.H.I, M.H.I selaku Pembimbing II dengan penuh kesabaran dan keikhlasan telah memberi arahan, semangat dan masukan kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan tugas akhir (skripsi).
6. Kepala Perpustakaan Daerah Sulawesi Tengah (PDST) dan Kepala Perpustakaan IAIN Palu, Supiani, S.Ag., serta seluruh Staf Perpustakaan IAIN Palu yang dengan tulus memberikan pelayanan dalam mencari referensi sebagai bahan proposal penelitian ini hingga menjadi sebuah karya ilmiah.
7. Bapak Dr. Marzuki, M.H, selaku penasehat Akademik penulis. Terimakasih atas bimbingan dan nasehat selama penulis kuliah.
8. Bapak/Ibu dosen dan seluruh karyawan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu umumnya dan khususnya dosen dan pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberi kemudahan kepada penulis dalam menyelesaikan proses studi sampai selesai.
9. Bapak Al aofin, selaku Kepala Desa Rarampadende Kecamatan Dolo Barat Kabupaten Sigi beserta Panitia Penyaluran Raskin , yang telah memberikan izin untuk meneliti dan bersedia memberikan informasi mengenai penyaluran raskin di desa Rarampadende dan memberikan data untuk melengkapi skripsi.
10. Sahabat-sahabat penulis seangkatan 2015 khususnya jurusan Ekonomi Syariah 4 serta Sahabatku yang teristimewa yang selalu memberikan inspirasi dan motivasi kepada penulis, Nurhayati, Siti Amanatul Khiariyah, Sabrina Meilinda, Nur Resma Akmayasari, Nurrmilla dan Teman-teman lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti yang sebenarnya, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Palu, 14 April 2019 M  
9 Syaban 1440 H

Penulis

SRI WAHYUNI  
NIM:15.3.12.0096

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Dan Batasan Masalah.....	8
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Penegasan Istilah.....	9
E. Garis-garis Besar Isi.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Relevansi Penelitian Terdahulu.....	12
B. Pengertian Kemiskinan .....	14
C. Penyebab kemiskinan.....	17
D. Jenis-jenis Kemiskinan.....	20
E. Pengertian Distribusi.....	20
F. Kebijakan Distribusi Dalam Sistem Ekonomi Islam .....	21
G. Konsep Beras miskin (Raskin).....	28



### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	32
B. Lokasi Penelitian.....	33
C. Kehadiran Peneliti.....	33
D. Data Dan Sumber Data.....	34
E. Tehnik Pengumpulan Data.....	34
F. Tehnik Analisa Data.....	36
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	37

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Desa Rarampadende Kecamatan Dolo Barat Kabupaten Sigi .....	40
B. Mekanisme Penyaluran Raskin di Desa Rarampadende Kecamatan Dolo Barat Kabupaten Sigi .....	56
C. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Mekanisme Penyaluran Raskin di Desa Rarampadende Kecamatan Dolo Barat Kabupaten Sigi .....	63

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	65
B. Saran.....	66

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **PEDOMAN WAWANCARA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **DOKUMENTASI**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL

Tabel I : Jumlah Penduduk Desa Rarampadende.....	44
Tabel II : Keadaan Penduduk Desa Rarampadende menurut mata pencaharian ...	47
Tabel III : Keadaan Penduduk Desa Rarampadende menurut jenis kelamin.....	51
Tabel IV : Jumlah Penduduk Menurut Agama yang dianut.....	52
Tabel V : Sarana Dan Prasarana.....	53
Tabel VI : Jumlah Penerima Raskin di desa Rarampadende .....	61

## **DAFTAR LAMPIRAN**

LAMPIRAN I : Surat Pengajuan Judul Skripsi

LAMPIRAN II : Surat Penunjukan Pembimbing Skripsi

LAMPIRAN III : Surat Izin Penelitian Untuk Menyusun Skripsi

LAMPIRAN IV : Surat Keterangan Meneliti dari Kantor Desa Rarampadende,  
Kecamatan Dolo Barat Kabupaten Sigi.

LAMPIRAN V : Pedoman Wawancara

LAMPIRAN VI : Daftar Informan

LAMPIRAN VII : Foto Wawancara

LAMPIRAN VIII : Daftar Riwayat Hidup

## **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Apa itu program Raskin ?
2. Apa saja yang menjadi tujuan dengan adanya program Raskin ?
3. Siapa saja yang berhak menerima Raskin ?
4. Berapa jumlah beras Raskin yang dapat diperoleh RTS-PM ?
5. Bagaimana mekanisme penyaluran beras Raskin ?

## ABSTRAK

Nama Penulis : Sri Wahyuni  
NIM : 15.3.12.0096  
Judul Skripsi : Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penyaluran Beras Miskin (Raskin) Di Desa Rarampadende Kecamatan Dolo Barat Kabupaten Sigi

---

Skripsi ini membahas tentang “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penyaluran Raskin di Desa Rarampadende Kecamatan Dolo Barat Kabupaten Sigi” ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini merupakan upaya untuk mengetahui Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penyaluran Bantuan Raskin di desa Rarampadende. Pertanyaan yang akan di jawab dari judul tersebut adalah : (1) Bagaimana mekanisme penyaluran raskin di desa rarampadende kecamatan dolo barat kabupaten Sigi. (2) Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap penyaluran Raskin di desa rarampadende kecamatan dolo barat Kabupaten Sigi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penyaluran beras miskin kepada masyarakat sehingga didapatkan fakta-fakta dan kenyataannya atas Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penyaluran Raskin di Desa Rarampadende Kecamatan Dolo Barat Kabupaten Sigi.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang diperoleh dari data primer (secara langsung) adalah hasil penelitian lapangan yaitu wawancara dengan pihak kepala desa, pihak panitia penyaluran Raskin dan warga yang mendapatkan beras raskin serta warga yang belum mendapatkn raskin. Adapun metode pengumpulan data yaitu dengan *interview*, *observasi* dan *dokumentasi*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme penyaluran bantuan raskin di desa Rarampadende dalam setahun menerima jatah raskin sebanyak empat kali, tepatnya tiga bulan sekali dengan 30 kg beras. Sebelum melakukan pembagian jatah raskin, dari pihak panitia Raskin telah melakukan pendataan, bagi masyarakat yang kurang mampu. Untuk penyaluran raskin dilakukan langsung oleh bulog kesetiap desa dan beras Raskin dialokasikan ke kantor desa kemudian dari pihak panitia penyaluran raskin langsung memberitahukan kepada warga yang sudah terdata mendapatkan raskin agar mereka mengambil di kantor desa. Dalam tinjauan ekonomi Islam Pendistribusian Raskin yang ada di desa Rarampadende belum sesuai dengan ekonomi Islam, karena masih belum terlaksana secara maksimal di karenakan masih ada ketidak merataannya sasaran dalam pembagian raskin. Masih banyak masyarakat miskin belum merasakan manfaat beras raskin. Hal ini disebabkan kurangnya perhatian dari pemerintah, pihak-pihak yang terlibat serta data-data informasi yang kurang lengkap menyebabkan tidak meratanya pendistribusian beras miskin (Raskin).

Saran Penulis diharapkan kepada pemerintah khususnya pihak panitia Raskin agar dapat memperbaiki kinerja mengenai pendistribusian beras raskin khususnya di desa Rarampadende Kecamatan Dolo Barat Kabupaten Sigi, agar permasalahan yang ada dalam pelaksanaan program bantuan raskin tersebut dapat di minimalisir

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### ***A. Latar Belakang***

Kemiskinan salah satu permasalahan negara yang belum terselesaikan sampai saat ini, termasuk negara Indonesia. Kemiskinan tidak hanya menjadi pokok masalah negara-negara berkembang, tetapi juga termasuk persoalan di negara industri maju. Kemiskinan adalah masalah negara, mengingat sebagian besar aktifitas penduduk bersifat agraris dengan modal yang sangat kecil. Kebanyakan masyarakat dari negara berkembang belum menguasai teknologi dan ilmu pengetahuan karena masih kurangnya infrastruktur, sehingga penduduknya hidup di garis kemiskinan.<sup>1</sup>

Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang tentang penanganan kemiskinan, yakni UU No.3 Tahun 2011, tentang penanganan kemiskinan. Regulasi yang dimaksudkan untuk menangani permasalahan kemiskinan di Indonesia. Ketentuan Umum Pasal 1, disebutkan fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai mata pencaharian dan atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya atau keluarganya.

---

<sup>1</sup>Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 68.

Islam adalah agama yang sangat lengkap dalam melihat permasalahan. Dengan demikian, tentu tidak tinggal diam membahas mengenai kemiskinan. Terdapat banyak ayat dalam al-Quran dan hadits yang bisa dijadikan rujukan dalam memahami kemiskinan. Tentunya melalui pemahaman para ulama dalam berbagai macam kitab-kitab fikihnya. Karena dalam konteks al-Quran dan sunah terdapat banyak istilah yang artinya merujuk pada kemiskinan secara umum yaitu kemiskinan adalah ketidak mampuan memenuhi kebutuhan hidup, baik karena tidak memiliki harta dan mata pencaharian sekaligus, maupun karena harta dan mata pencaharian sekaligus, maupun karena harta dan mata pencaharian yang tidak mencukupi.<sup>2</sup>

Kemiskinan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai persamaan arti dengan kata kefakiran, dua kata ini biasanya disebutkan secara bersamaan yakni fakir dan miskin yang berarti orang yang sangat kekurangan.<sup>3</sup>

Kemiskinan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Faktor tersebut antara lain tingkat pendapatan, pendidikan, kesehatan, akses barang dan jasa, lokasi geografis, gender dan kondisi lingkungan.<sup>4</sup> Berbagai upaya telah dilakukan dengan beragam kebijakan dan program telah disusun dan dilaksanakan, sejumlah dana telah dikeluarkan

---

<sup>2</sup>Kuntarno Noor Aflah, "Ziswaf : Zakat dan Wakaf", *Urgensi Penetapan Kriteria Fakir Miskin Bagi Penyaluran Zakat di Indonesia*, Vol. 4, No, 1, (2017), 171 [www.journal.stainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/download/3037/2294](http://www.journal.stainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/download/3037/2294) (Diakses 12 Desember 2018)

<sup>3</sup>Lukman Ali dkk, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua, cetan ketujuh, (Jakarta: Balai Pustaka, 196), 660

<sup>4</sup>Dewanta Awan Setya, *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*, (Yogyakarta: Aditya Media, 2000) 118.



untuk menanggulangi kemiskinan. Pemerintah saat ini memiliki berbagai program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi mulai dari program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat serta yang berbasis pemberdayaan usaha kecil, yang dijalankan oleh berbagai elemen pemerintah baik pusat maupun daerah.

Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan) di Indonesia pada tahun 2017. Penduduk miskin tercatat 26,58 juta orang (10,12 persen) dari penduduk Indonesia.<sup>5</sup>

Permasalahan kemiskinan ini tidak hanya disebabkan oleh faktor sosial, budaya, politik dan juga terkait masalah ekonomi. Khususnya di Desa Rarampadende Kecamatan Dolo Barat Kabupaten Sigi jumlah penduduk mencapai 2.008 jiwa dan mempunyai 593 KK. Hasil data tahun 2015-2017 penduduk miskin mencapai 180 KK.<sup>6</sup> Faktor kemiskinan di desa Rarampadende ini di sebabkan oleh faktor pengangguran yang dimana skill atau kemampuan warga masih tergolong minim.

Melihat tingginya angka kemiskinan seharusnya menjadi perhatian nasional dan perlu dilakukan secara terpadu sehingga melibatkan berbagai sektor, baik ditingkat pusat maupun daerah. Dalam hal ini penyelenggara pemerintah bertanggungjawab atas kelangsungan dan kesejahteraan rakyatnya

---

<sup>5</sup>BPS, "Jumlah Penduduk Indonesia", *Situs Resmi BPS* :<https://www.bps.go.id> (diakses 9 Agustus 2018).

<sup>6</sup>Dokumen, Kantor Desa Rarampadende Kecamatan Dolo Barat Kabupaten Sigi, (tanggal 10 Agustus 2018).

melalui program-program penanggulangan kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Untuk menindaklanjuti program-program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah yang ditujukan kepada masyarakat miskin, maka pemerintah menetapkan salah satu program penanggulangan kemiskinan melalui program perlindungan sosial yaitu penyediaan dan penyaluran beras bersubsidi bagi masyarakat miskin (raskin). Program ini dibentuk agar keluarga miskin memiliki akses yang baik terhadap pangan (beras) dalam harga dan ketersediaan. Program raskin ini dimulai sejak Juli 1998 dengan nama OPK (Operasi Pasar Khusus).<sup>7</sup>

Pada tahun 2002 Program OPK diubah namanya menjadi program beras rumah tangga miskin (raskin) dan pada tahun 2008 menjadi beras bersubsidi untuk masyarakat berpendapatan rendah.<sup>8</sup> Ketidakmampuan masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan pangan terlihat dari resiko rawan pangan di Tanah Air yang masih tinggi. Pemenuhan kebutuhan pokok merupakan hal-hal yang sangat sulit bagi penduduk miskin karena masyarakat miskin umumnya menggunakan proporsi besar kebutuhannya hanya untuk makan.

Tujuan dari program raskin adalah mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok bentuk beras. Selain itu raskin juga bertujuan untuk meningkatkan atau membuka akses pangan keluarga melalui penjualan beras kepada keluarga penerima manfaat

---

<sup>7</sup>Musdalifa, "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penyaluran Bantuan Raskin di Kelurahan Silae Kecamatan Ulujadi", Skripsi tidak diterbitkan (Palu : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu, 2015), 20.

<sup>8</sup>Zulfa, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Distribusi Beras Bersubsidi Untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah (Raskin) Secara Merata (Studi Kasus di Desa Purwokerto Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal)", Skripsi tidak diterbitkan, (Semarang : Fakultas Syariah UIN Walisogo, 2014), 1.

dengan jumlah yang telah ditentukan. Keluarga penerima manfaat beras raskin yaitu keluarga yang berpendapatan rendah (miskin atau rentan miskin) atau disebut dengan rumah tangga sasaran penerima manfaat.

Hal ini telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan.<sup>9</sup>

Kemiskinan dapat mengakibatkan berbagai bahaya yaitu dapat menimbulkan penyimpangan akidah, mendorong timbulnya kejahatan dan pelanggaran, dapat membahayakan keluarga, dan merusak moral dan akhlak. Oleh karena itu, untuk meminimalisir bahaya-bahaya yang timbul akibat dari kemiskinan tersebut, maka kaum muslimin harus menyantuni orang-orang miskin.

Berdasarkan pedoman umum raskin, masing-masing keluarga miskin akan menerima beras sebesar 10 Kg/KK/bulan perkepala Keluarga. Namun, dalam prakteknya, pelaksanaan program raskin ini masih belum sesuai harapan karena masih ada ketidaktepatan sasaran sehingga terdapat ketidakadilan dalam proses penyalurannya.

Khusus di Desa Rarampadende Kecamatan Dolo Barat Kabupaten Sigi, dalam pelaksanaan penyaluran bantuan raskin kerap terjadi masalah karena data yang didapatkan tidak sesuai dengan data yang ada dilapangan. Data penerima

---

<sup>9</sup>Ibid., 2.

raskin di desa Rarampadende seharusnya berjumlah 180 KK tetapi karena pada saat pendataan mereka sebagian tidak terdata karena belum adanya kartu keluarga dan ktp yang sudah diperbaharui sehingga pihak panitia raskin belum mendata masyarakat tersebut. Menurut informasi yang penulis dapatkan melalui wawancara dengan salah satu panitia penyaluran Raskin dan salah satu warga yang belum mendapatkan beras miskin (raskin) di Desa Rarampadende mengatakan bahwa

Penyaluran beras miskin atau raskin ini belum sepenuhnya maksimal, karena ada beberapa warga yang tergolong tidak mampu atau miskin belum mendapatkan beras raskin, karena pada saat pendataan untuk penerima raskin mereka tidak terdata.<sup>10</sup>

Kemudian salah satu warga miskin yang belum mendapatkan beras raskin, mengatakan bahwa :

“pemerintah desa seharusnya memperbaharui kembali data-data yang ada, agar mereka juga bisa dapat menerima beras raskin”.<sup>11</sup>

Jadi pelaksana maupun masyarakat miskin merasakan ketidakmerataannya penyaluran bantuan raskin terhadap masyarakat miskin. Ketidakmerataannya penyaluran ini menyebabkan tidak maksimalnya pelaksanaan program ini. Dimana ada masyarakat yang tergolong berpenghasilan rendah belum mendapatkan bantuan beras raskin dikarenakan data yang diterima mengatakan bahwa masyarakat tersebut benar dalam kategori miskin.

---

<sup>10</sup>Tahkim, Panitia Penyaluran Beras Raskin di Desa Rarampadende, “Wawancara” Kantor Desa Rarampadende, Ruangn Aula, Tanggal 22 Desember 2018

<sup>11</sup>Wati, Warga Desa Rarampadende, “Wawancara” Rumah Warga Desa Rarampadende, ruangan tamu, Tanggal 23 Desember 2018

Miskin yang dimaksud pada desa Rarampadende ini adalah miskin relative di mana kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan.

Berdasarkan latar belakang itulah penulis meneliti lebih jauh tentang mekanisme penyaluran bantuan raskin di Desa Rarampadende. Melihat penyaluran tidak sepenuhnya sesuai dengan nilai ke Islaman seperti Kejujuran dan keadilan. Apa yang ada di tengah masyarakat desa Rarampadende mengenai penyaluran bantuan Raskin tak merata sehingga masyarakat merasa ada ketidakadilan .

## **B. Rumusan Dan Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka permasalahan pokok yang di bahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana mekanisme penyaluran bantuan beras miskin (RASKIN) di Desa Rarampadende Kecamatan Dolo Barat Kabupaten Sigi ?
2. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap mekanisme penyaluran bantuan beras miskin (RASKIN) di Desa Rarampadende Kecamatan Dolo Barat Kabupaten Sigi ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui mekanisme penyaluran bantuan beras bersubsidi (RASKIN) di Desa Rarampadende Kecamatan Dolo Barat Kabupaten Sigi.
2. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam mekanisme penyaluran bantuan beras bersubsidi (RASKIN) Di Desa Rarampadende Kecamatan Dolo Barat Kabupaten Sigi.

Adapun kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk peneliti, sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Studi Strata Satu (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Palu.
2. Untuk mahasiswa sebagai bahan referensi bagi peneliti berikutnya yang ingin melakukan penelitian tentang tinjauan ekonomi Islam terhadap penyaluran bantuan beras miskin (RASKIN).

3. Untuk tempat penelitian khususnya di Desa Rarampadende Kecamatan Dolo Barat Kabupaten Sigi, sebagai pertimbangan untuk meningkatkan penyaluran bantuan raskin terhadap masyarakat miskin sehingga terciptanya pemerataan.

#### **D. Penegasan Istilah**

Adapun istilah yang memerlukan penegasan berdasarkan judul penelitian ini adalah tinjauan ekonomi Islam terhadap penyaluran raskin di Desa Rarampadende Kecamatan Dolo Barat Kabupaten Sigi yaitu sebagai berikut :

##### 1. Tinjauan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tinjauan berasal dari kata tinjau yang berarti melihat, menjenguk, memeriksa dan meneliti untuk kemudian mengambil kesimpulan. Kemudian tinjauan adalah hasil dari kegiatan meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki atau mempelajari).<sup>12</sup>

##### 2. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah pengetahuan dan aplikasi dari ajaran dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh sumber-sumber daya material memenuhi kebutuhan manusia yang memungkinkan untuk melaksanakan kewajiban kepada Allah dan masyarakat.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>“Tinjauan”, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online* : <http://kamusbahasaIndonesia.org/tinjauan.ac.id> (diakses 12 agustus 2018)

<sup>13</sup>Rozalinda, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2014), 3

### 3. Penyaluran

Penyaluran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu “pembagian, pengiriman, pengedaran, penyebaran kepada beberapa orang atau kebeberapa tempat.”<sup>14</sup>

### 4. Raskin

Raskin merupakan subsidi pangan pokok dalam bentuk beras yang diperuntukan bagi keluarga miskin sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan pada keluarga miskin.<sup>15</sup>

Berdasarkan penegasan istilah diatas dapat dipahami penulis bahwa dengan meninjau penyaluran raskin dalam ekonomi Islam dapat membantu pelaksanaan penyaluran raskin secara merata dan adil, agar manfaat raskin bisa dirasakan oleh semua masyarakat miskinyang berada didaerah yang jadi tempat penelitian ini.

### ***E. Garis-Garis Besar Isi***

Untuk mempermudah pemahaman bagi pembaca terhadap skripsi ini, maka peneliti menyusun beberapa garis-garis besar dalam penelitian ini. Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah :

Bab I pendahuluan, yang bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah yang menjadi alasan diambilnya judul dalam penelitian ini, rumusan

---

<sup>14</sup>“Penyaluran”, Akademik Telkom: Kata Bahasa Indonesia Online : <http://tesaurus.akademitelkom.ac.id/penyaluran.html> (diakses 13 Agustus 2018)

<sup>15</sup>Bulog, “Sekilas Raskin”, *Situs Resmi Bulog*, <http://www.bulog.co.id/sekilasraskinv2.php> (diakses 13 Agustus 2018).



masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, serta garis-garis besar isi proposal skripsi.

Bab II tinjauan pustaka, yang mana bab ini menguraikan penelitian terdahulu yang merupakan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan dengan penelitian, kajian teori merupakan landasan teori yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini, serta kerangka dan hipotesis.

Bab III metode penelitian, bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang mencakup : jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data yang diperoleh dari hasil pengamatan penulis dari hasil wawancara dari informan yang terkait dengan masalah yang diteliti, teknik pengumpulan data, teknik analisa data dan pengecekan keabsahan data.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### ***A. Relevansi Penelitian Terdahulu***

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti, sudah pernah ada beberapa penelitian yang mengkaji tentang penyaluran bantuan *raskin*, diantaranya adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh saudari Hikmah Munthe, angkatan 2009 Mahasiswa Program Strata 1 (S1) Universitas Sumatra Utara Medan dengan judul penelitian “Evaluasi Program Beras Miskin (Raskin) di Lingkungan Kelurahan Sitirejo 1 Kecamatan Medan Kota “ dimana dalam penelitian tersebut titik beratnya adalah mengenai evaluasi program raskin pada masyarakat rumah tangga sasaran penerima raskin di Kelurahan Sitirejo 1 Kecamatan Medan Kota.<sup>1</sup>

Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah keduanya membahas tentang program raskin, sedangkan perbedaannya terletak pada tempat dan objek penelitian.

2. Penelitian yang dilakukan oleh saudari Defit Sulistiyowati, angkatan 2011 Mahasiswa Program Strata 1 (S1) IAIN Sunan Ampel dengan judul “ Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Penarikan Upah Dalam Implementasi Kebijakan Program Penyaluran Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) di Desa Glodog Kecamatan Palang Kabupaten Tuban” dimana dalam penelitian tersebut titik beratnya adalah mengenai praktek penarikan upah terhadap pelaksanaan kebijakan program raskin dan tinjauan hukum Islam terhadap praktek tersebut dalam memenuhi ketentuan syarat-syarat dan rukun dari ujah.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Hikmah Munthe, “Evaluasi Program Beras Miskin (Raskin) di lingkungan Kelurahan Sitirejo 1 Kecamatan Medan Kota”, Skripsi tidak diterbitkan, (Medan : Universitas Sumatera Utara , 2009), 3.

<sup>2</sup>Defit Sulistiyowati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Upah Dalam Implementasi Kebijakan Program Penyaluran Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) Di Desa Glodog Kecamatan Palang Kabupaten Tuban”, Skripsi tidak diterbitkan, (Surabaya : Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2011), 5.

Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah keduanya membahas mengenai kebijakan program penyaluran raskin, sedangkan perbedaannya terletak pada tempat dan objek penelitian dan penelitian tersebut menitik beratkan mengenai praktek penarikan upah terhadap pelaksanaan kebijakan raskin dan tinjauan hukum islam terhadap praktek dalam memenuhi ketentuan syarat-syarat dan rukun ujah.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Saudari Winria Pitapurwati, angkatan 2014 Mahasiswa Program Strata 1 (S1) Universitas Hasanudin, dengan Judul penelitian “Pelaksanaan Penyaluran Raskin di Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa” dimana dalam penelitian tersebut titik beratnya adalah mengenai fenomena enam tepat(6 t) dalam pelaksanaan penyaluran raskin pada masyarakat di Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat telah tercapai.<sup>3</sup>

Persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada pembahasan pelaksanaan penyaluran raskin, sedangkan perbedaannya penelitian ini adalah dari segi metode penelitian yang digunakan, penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian kuantitatif sedangkan penelitian ini menggunakan jenis kualitatif. Kemudian penelitian terdahulu lebih terfokus pada fenomena tempat (6t) dalam pelaksanaan penyaluran raskin.

Berdasarkan uraian di atas dalam kaitanya dengan penelitian ini, penelitian ini menitik beratkan pembahasannya mengenai mekanisme penyaluran bantuan beras bersubsidi (raskin) di Desa Rarampadende Kecamatan Dolo Barat Kabupaten Sigi ditinjau dari Ekonomi Islam. Peneliti ingin mengetahui bagaimana mekanisme

---

<sup>3</sup>Winria Pitapurwati, “Pelaksanaan Penyaluran Raskin Di Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa”, Skripsi tidak diterbitkan (Makassar :Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Administrasi Negara Universitas Hasanudin, 2014), 3.

penyaluran bantuan beras bersubsidi di Desa Rarampadende Kecamatan Dolo Barat Kabupaten Sigi ditinjau dari Ekonomi Islam.

## **B. Definisi Kemiskinan**

Kemiskinan menurut Shirazi dan Pramanik yang dikutip Irfan Syauqi Beik :

Sebagai suatu situasi yang dihadapi oleh seorang individu dimana mereka tidak memiliki kecukupan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang nyaman, baik ditinjau dari sisi ekonomi, sosial, psikologis, maupun ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>4</sup>

Konsep ini sejalan dengan konsep yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*).<sup>5</sup> Dengan pendekatan ini kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Kemiskinan merupakan gambaran kehidupan diberbagai negara berkembang. Mencakup lebih dari satu milyar penduduk dunia, terutama didaerah pedesaan (masyarakat petani). Kemiskinan merupakan permasalahan yang diakibatkan oleh kondisi nasional suatu negara, tidak hanya merupakan tantangan dan kesempatan bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan

---

<sup>4</sup>Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 68.

<sup>5</sup>Suparti, Hartutiningsih dan Anwar Alaydrus, "Journal Administrative Reform", *Evaluasi Pelaksanaan Program Beras Miskin (RASKIN) di Kecamatan Samarinda Ulu, jurnal Aministrative Reform*, vol 5 no. 1, (2017), 285 <https://www.ejournal.ar.mian.fisip.ac.id> (Diakses 29 Agustus 2018).

suatu negara, tetapi juga mengandung resiko dan ketidakpastian masa depan perekonomian dunia.<sup>6</sup>

Kemiskinan pada umumnya diukur dengan rendahnya tingkat pendapatan.

Mengenai kemiskinan Gunawan Somodiningrat membagi 2 kategori kemiskinan ;

1. Kemiskinan absolut adalah kemiskinan yang timbul karena pendapatan seseorang berada digaris kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti sandang, pangan, dan papan.
2. Kemiskinan relative adalah keadaan perbandingan antara kelompok masyarakat dengan tingkat pendapatan sudah diatas garis kemiskinan. Sehingga sebenarnya tidak termasuk miskin, tetapi masih lebih miskin dibandingkan dengan kelompok masyarakat lain.<sup>7</sup>

Suharto Edi menjelaskan ada sembilan kriteria yang menandai kemiskinan ;

1. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan,sandang dan papan);
2. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental;
3. Ketidakmampuan dan ketidak beruntungan sosial (anak terlantar, wanita korban tindak kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marginal dan terencil);
4. Rendahnya sumberdaya kualitas manusia (buta huruf, rendahnya pendidikan dan keterampilan, sakit-sakitan). dan keterbatasan sumber daya alam (tanah tidak subur, lokasi terencil, ketiadaan infrastruktur jalanan, listrik, dll);

---

<sup>6</sup>Koten, D. C. dan Sjahrir, *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*, (Cet. I ; Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1999), 78.

<sup>7</sup>Gunawan Sumodiningrat, *Membangun Perekonomian Rakyat*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000), 26.

5. Kerentanan terhadap guncangan yang bersifat individual (rendahnya pendapatan dan aset). Maupun masal (rendahnya modal sosial, ketiadaan fasilitas umum);
6. Ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang memadai dan berkesinambungan;
7. Ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, air bersih dan transportasi);
8. Ketiadaan jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga atau tidak adanya perlindungan sosial dari negara dan masyarakat);
9. Keterlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat.<sup>8</sup>

Dari kedua pakar tersebut di atas dipahami bahwa kriteria kemiskinan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor secara internal, yaitu lemahnya sumber daya manusia (pengetahuan, sikap mental, dan keterampilan), dan cacat fisik atau mental. Sedangkan faktor secara eksternal, yaitu masyarakat tidak mendapatkan pendidikan yang memadai, tidak mendapatkan lapangan pekerjaan, dan banyaknya tanggungan atau anggota keluarga.

Solusi dari faktor internal dan eksternal yaitu agar sekiranya pemerintah dapat memperhatikan masyarakat yang kurang mampu, agar mereka bisa meningkatkan pendapatan mereka, seperti pemerintah melakukan pelatihan-pelatihan untuk masyarakat yang kurang mampu agar dapat menambah skill dan bisa mengembangkan ke ahlian dalam bidangnya.

### **C. Penyebab Kemiskinan**

Menurut Kartasmita kemiskinan disebabkan oleh sekurang-kurangnya empat penyebab yaitu :

---

<sup>8</sup>Suharto Edi D, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*, (Bandung : Alfabeta. 2009), 16.

1. Rendahnya taraf pendidikan, taraf pendidikan yang rendah menyebabkan kemampuan pengembangan diri terbatas dan menyebabkan sempitnya lapangan kerja yang dapat dimasuki.
2. Rendahnya derajat kesehatan, taraf kesehatan dan gizi yang rendah menyebabkan rendahnya daya tahan fisik, dan daya fikir.
3. Terbatasnya lapangan pekerjaan, keadaan kemiskinan karena kondisi pendidikan diperberat oleh terbatasnya lapangan pekerjaan.
4. Kondisi keterisolasian, banyak penduduk miskin, secara ekonomi tidak berdaya karena terpencil dan terisolasi.<sup>9</sup>

Adapun penyebab kemiskinan bisa terjadi :

1. Faktor individual, dimana seseorang menjadi menjadi miskin karena faktor pribadinya seperti cacat permanen yang menyebabkan ia menjadi miskin.
2. Faktor sosial, dimana kemiskinan terjadi akibat diskriminasi sosial yang dilakukan.
3. Faktor kultural, dimana seseorang menjadi miskin karena perilaku buruknya yang disebabkan oleh faktor buruknya, seperti malas untuk bekerja dan berusaha.
4. Faktor struktural, dimana kemiskinan terjadi akibat ketidakadilan sistem ekonomi.

Ada tiga penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi yaitu :

---

<sup>9</sup>Kartasmita, *Urbanisasi dan Kemiskinan*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999), 14.

1. Secara mikro kemiskinan muncul karena pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah yang terbatas dan kualitas rendah.
2. Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber manusia yang rendah berarti produktifitas rendah. Rendah kualitas sumber daya ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi atau karena keturunan.
3. Kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal.<sup>10</sup>

Dari uraian diatas maka penulis dapat pahami bahwa penduduk miskin pada umumnya berpendidikan rendah. Sehingga berpengaruh pada sumber penghasilan, hal ini terpusat didaerah seperti pedesaan yang terbelakang, daerah terpencil, daerah yang mengalami permasalahan khusus seperti daerah bencana dan bergantung hidupnya pada sumber daya alam.

Dalam perspektif syariah, terjadinya perbedaan pendapatan yang menjadi penyebab kemiskinan sesungguhnya merupakan *sunnatullah fil hayah*. Keberadaan kelompok masyarakat yang berbeda-beda penghasilan sesungguhnya tidak bisa dibandingkan. Karena itu, Islam tidak pernah berbicara mengenai bagaimana upaya untuk “menghilangkan” kemiskinan, akan tetapi berbicara bagaimana mereduksi dan meminimalisir kemiskinan agar kehidupan yang lebih sejahtera bisa diraih. Caranya adalah dengan mengembangkan sikap saling tolong menolong, saling membantu,

---

<sup>10</sup>Ibid., 18.



saling bersilaturahmi, saling mengisi dan saling bersinergi serta mengutamakan 8 asnaf yang sudah ditentukan dalam syariah.<sup>11</sup>

Dalam menyusun standar kebutuhan pokok, dan dalam mendefinisikan kemiskinan, maka perhitungan dan standardisasi terhadap kebutuhan minimal ibadah dan spiritual, harus dapat dikalkulasikan dan didefinisikan dengan baik. Sehingga, definisi kemiskinan dapat dikembangkan menjadi kemiskinan materiil dan spiritual.

Kemiskinan materiil didasarkan pada ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan materiil sepenuhnya. Kebutuhan materiil ini, seperti sandang, pangan dan papan, harus didefinisikan melalui proses analisis dan survey yang tepat, sesuai dengan kondisi kehidupan masyarakat yang ada. Sedangkan kemiskinan spiritual didasarkan pada ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan spiritual minimal, melalui pelaksanaan ibadah yang diwajibkan maupun dianjurkan dalam Islam. Ketidakmampuan pemenuhan kebutuhan materiil dan spiritual ini berbeda penyebabnya.<sup>12</sup>

Pada kemiskinan materiil, penyebabnya adalah lebih kepada alasan yang bersifat ekonomis, yaitu ketidakcukupan pendapatan dalam membiayai kebutuhan pokok diri dan keluarga. Adapun kemiskinan spiritual lebih disebabkan pada pengetahuan dan pemahaman terhadap ajaran agama yang kurang tepat atau ada unsur kesengajaan untuk tidak mau melaksanakan agama.

---

<sup>11</sup>Ibid., 71.

<sup>12</sup>Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, 74.

#### **D. Jenis-Jenis Kemiskinan**

Pembagian jenis kemiskinan dapat di bagi berdasarkan pola waktu. Pola waktu kemiskinan dapat dibagi menjadi :

- 1) *Persistent poverty*, yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun temurun yang diantaranya merupakan daerah kritis sumber daya alam atau tersolasi.
- 2) *Cylical poverty* yaitu kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan.
- 3) *Seasonal poverty* yaitu kemiskinan musiman seperti sering dijumpai kasus-kasus nelayan dan petani tanaman pangan.
- 4) *Accidental poverty* yaitu kemiskinan karena bencana alam atau dampak dari suatu kebijakan.<sup>13</sup>

Meskipun masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara layak (tidak miskin), tetapi masih kualitasnya dibandingkan masyarakat sekitarnya yang relatif lebih kaya. Kemiskinan *absolute* keberadaannya masih dapat dihilangkan, tetapi hanya dapat dikurangi intensitasnya.

#### **E. Definisi Distribusi**

Distribusi merupakan salah satu aktivitas perekonomian manusia, di samping produksi dan konsumsi. Dorongan al-Qur'an pada sektor distribusi telah di jelaskan secara eskplisit. Ajaran islam menuntun kepada manusia untuk menyebarkan hartanya agar kekayaan tidak hanya menumpuk pada segolongan kecil masyarakat. Dalam pandangan Islam, Pendistribusian harta yang tidak adil

---

<sup>13</sup>Suharto Edi D, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*, 84-88.

dan merata akan membuat orang yang kaya bertambah kaya dan yang miskin semakin miskin.<sup>14</sup>

Sebagai salah satu aktivitas perekonomian, distribusi menjadi bidang kajian terpenting dalam perekonomian. Distribusi menjadi posisi penting dari teori mikro dan makro Islam sebab pembahasan dalam bidang distribusi ini tidak hanya berkaitan dengan aspek sosial dan politik sehingga menjadi perhatian bagi aliran pemikir ekonomi.

#### **F. Kebijakan Distribusi dalam Sistem Ekonomi Islam**

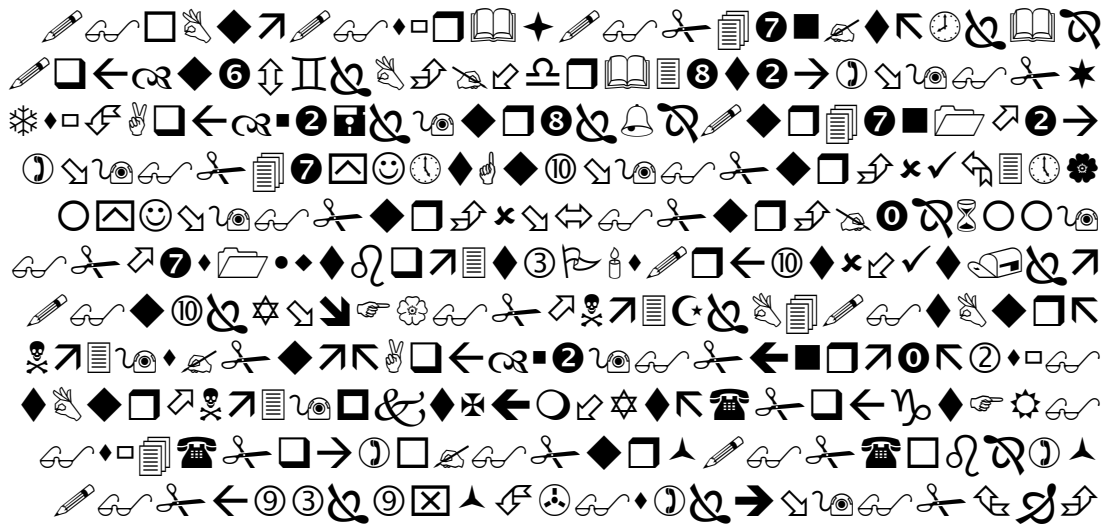
Sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang lahir dari sistem sosial Islami yang diharapkan dapat memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan yang ada. Dengan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada kemaslahatan dan keadilan dalam ekonomi umat.

Salah satu ajaran penting dalam Islam adalah adanya tuntunan agar manusia berupaya menjalani hidup secara seimbang, memperhatikan kesejahteraan hidup didunia dan keselamatan hidup diakhirat. Sebagai persyaratan kesejahteraan hidup di dunia adalah bagaimana sumber-sumber daya ekonomi dapat dimanfaatkan secara maksimal dan benar dalam kerangka Islam.

Kebijakan distribusi dalam sistem Ekonomi Islam menjunjung tinggi nilai keadilan yang didasarkan pada konsep distribusi seperti dalam Q.S[59] Al-Hasyr: 7

---

<sup>14</sup> Moh. Holis, "Journal Perbankan Syariah", *Sistem Distribusi Dalam Perspektif Ekonomi Islam, Journal Perbankan Syariah*, Vol. 1 no. 2, November 2006 ISSN:2527-6344 <https://www.journal.ar.mian.fisip.ac.id> (Di akses 7 Juni 2019)



Terjemahnya:

Harta rampasan *fai* yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya.<sup>15</sup>

Ayat di atas merupakan landasan munculnya hukum bagi tindakan penyeimbangan ekonomi ditengah masyarakat dengan cara memberikan apa yang menjadi milik negara pada orang-orang tertentu yang memerlukan.

Menurut M. Qurasy Shibab, ayat tersebut bermaksud bahwa ;

Harta benda hendaknya jangan hanya menjadi milik dan kekuasaan kelompok manusia. Harta benda yang harus beredar di masyarakat, sehingga dapat di nikmati semua anggota masyarakat dengan tetap mengakui hak pemilihan dan melarang monopoli, karena sejak awal Islam menetapkan bahwa harta memiliki fungsi sosial.<sup>16</sup>

<sup>15</sup>Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an Per Kata: Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul & Terjemahannya*, (Cet. V ; Jakarta : Magfirah Pustaka, 2009), 546.

<sup>16</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al- Mishbah*,(Vol. 14; Jakarta : Lentera Hati, 2002), 122-113.

Dalam Ekonomi Islam tidak membenarkan penumpukan kekayaan hanya pada orang-orang tertentu atau kelompok tertentu. Bahkan mengarisikan prinsip keadilan dan persaudaraan (kasih sayang) pada konsep distribusinya. Pengelolaan kekayaan tidak dibenarkan hanya sepihak pada golongan atau sekelompok orang tertentu tetapi juga harus bersebar pada seluruh masyarakat. Sebaliknya Islam tidak memaksa individu diletakan pada tingkat ekonomi yang sama. Agar kebijakan yang ditawarkan Ekonomi Islam dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan seperangkat aturan yang menjadi prinsip dalam proses distribusi dan institusi yang berperan dalam menciptakan keadilan distribusi.<sup>17</sup>

### **1. Prinsip distribusi dalam sistem Ekonomi Islam**

Ada beberapa prinsip yang mendasari proses distribusi dalam ekonomi Islam yang terdapat dalam QS. [59] Al-Hasyr : 7 sebagaimana dikemukakan sebelumnya, yakni :

#### **a. Keadilan dalam Distribusi**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keadilan merupakan kata sifat yang menunjukkan perbuatan, perlakuan adil, tidak berat sebelah, tidak berpihak, berpegang kepada kebenaran, proposional.<sup>18</sup>

Dengan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa keadilan dalam distribusi merupakan satu kondisi yang tidak memihak pada salah satu pihak atau golongan

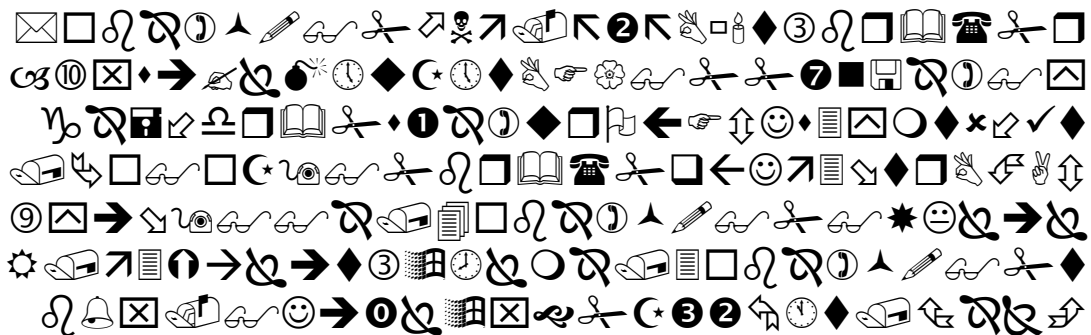
---

<sup>17</sup>Afzalur Rahman, *Economic Dokrines Of Islam*, terj. Soeroyo, (Yogyakarta : Dhana Bakti Wakaf, 1995), 12.

<sup>18</sup>“Adil”, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* : <https://kbbi.web.id/adil> (diakses 22 Desember 2018).

tertentu dalam ekonomi, sehingga menciptakan keadilan merupakan kewajiban yang tidak bisa dihindari dalam ekonomi Islam.

Keadilan adalah tujuan universal yang ingin dicapai dalam keseimbangan yang sempurna (*perfect equilibrium*). Pengertian lain disampaikan sebagaimana yang dikutip oleh al-Farabi bahwa keadilan adalah sama dengan keseimbangan. Dalam tafsir Al-Qur'an, perintah adil adalah perintah yang paling dianjurkan dan harus diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan. Seperti yang terdapat dalam Q.S [4] An-Nisa: 58 yakni :



Terjemahnya:

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil.Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.<sup>19</sup>

<sup>19</sup>Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an Per Kata: Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul & Terjemahannya*, 87.

Distribusi adalah prinsip utama dalam ekonomi Islam. Sistem Ekonomi Islam menghendaki bahwa dalam hal pendistribusian harus didasarkan pada dua sendi, yaitu kebebasan dan keadilan.<sup>20</sup>

Kebebasan disini adalah kebebasan yang dibingkai oleh nilai-nilai tauhid dan keadilan. Sedangkan keadilan dalam pendistribusian ini tercermin dari larangan dalam Qs. Al-Hasyr ayat 7. Oleh karena itu, dalam sistem Ekonomi Islam penumpukan harta kekayaan oleh sekelompok orang harus dihindarkan dan langkah-langkah dilakukan secara otomatis untuk memindahkan aliran kekayaan kepada masyarakat yang lemah. Selain itu, sendi kebebasan sistem Ekonomi Islam memberikan peluang dan akses yang sama dan memberikan hak-hak alami kepada semua orang.

#### **b. Mengakui Kepemilikan Pribadi**

Islam mengakui hak kepemilikan pribadi terhadap harta benda, dan membenarkan pemilikan harta yang dilakukan dengan cara yang halal merupakan bagian dari motivasi manusia untuk berusaha memperjuangkan kesejahteraan dirinya, dan memakmurkan bumi, sebagaimana kewajiban bagi seorang khilafah. Sebaliknya, tidak membenarkan penggunaan harta pribadinya sebebaskan-bebasnya tanpa batas dan

---

<sup>20</sup>Anita Rahmawaty, "Jurnal Aministrative Reform", *Distribusi dalam Islam dalam Upaya Pemerataan Kesejahteraan Melalui Keadilan*, vol. 1, No. 1, (Juni 2013), 7. [journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/download/198/pdf](http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/download/198/pdf) (diakses 30 Agustus 2018)

kehendak hatinya. Kepemilikan terhadap harta tidak menutup kewajiban untuk tidak melupakan hak-hak orang miskin yang terdapat pada harta tersebut.<sup>21</sup>

Didalam harta yang dimiliki ada hak orang lain, secara langsung membuka hubungan horizontal dan mempersempit jurang pemisah ditengah-tengah masyarakat antara sikaya dan simiskin. Bahkan jika dilihat lebih jauh maka sesungguhnya pemilik harta merupakan pemegang amanah Allah swt, karena semua kekayaan dan harta benda pada dasarnya milik Allah swt, dan manusia memegangnya hanya sebagai suatu amanah yang akan diminta pertanggungjawaban atas harta benda tersebut. Jika kesadaran tersebut telah tumbuh, maka secara langsung akan membentuk pribadi yang tidak hanya berpikir menciptakan kesejahteraan individual, tetapi juga bertanggungjawab terhadap terciptanya kesejahteraan pada lingkungan sosial.

### ***c. Larangan Menumpuk Harta***

Dalam Islam penumpukan harta berlebihan sangat jelas bertentangan dengan kepentingan umum yang berimbas pada rusaknya sistem sosial dengan munculnya kelas-kelas yang mementingkan kepentingan pribadi. Disamping itu, penumpukan harta berlebihan dapat melemahkan daya beli masyarakat dan menghambat mekanisme pasar bekerja secara adil. Apabila terjadi demikian, maka pemerintah dibenarkan dengan kekuasaannya, untuk mengambil secara paksa harta tersebut demi kepentingan masyarakat. Kebijakan membatasi harta pribadi dapat dibenarkan dan

---

<sup>21</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), 69-70.



dilakukan untuk menjamin terciptanya kondisi sosial yang sehat dan terwujudnya landasan keadilan distribusi di masyarakat.<sup>22</sup>

## 2. *Distribusi Secara Merata*

Islam mengajarkan agar harta tidak menumpuk pada golongan tertentu dimasyarakat dan mendorong terciptanya pemerataan dengan tidak berpihak pada satu kelompok atau golongan tertentu, sehingga proses distribusi dapat berjalan dengan adil. Ini dapat dilakukan dengan memberikan peluang yang sama bagi masyarakat untuk mendapatkan harta kekayaan, dan mewajibkan bagi yang mendapatkan harta berlebih untuk mengeluarkan zakat sebagai kompensasi bagi pensucian dan pembersihan harta tersebut atas hak orang lain.

Pemerataan distribusi merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan keadilan, karena Islam menghendaki kesamaan pada manusia dalam memperoleh peluang untuk mendapatkan harta kekayaan tanpa memandang perbedaan kasta maupun kulit.<sup>23</sup>

Pada prinsipnya distribusi mewujudkan beberapa hal berikut :

- 1) Pemenuhan kebutuhan bagi semua makhluk;
- 2) Memberikan efek positif bagi pemberi itu sendiri seperti halnya zakat disamping dapat membersihkan diri dan harta, juga meningkatkan keimanan dan menumbuhkan kebiasaan untuk berbagi;

---

<sup>22</sup>Afzalur Rahman, *Economic Doktrines of Islam*, 106.

<sup>23</sup>Remi, Sutyastie Soemitro dan Prijono Tjiptoherijayanto, *Kemiskinan dan Ketidakmerataan di Indonesia* (Jakarta : Penerbit Rineka Cipta, 2002), 63.

- 3) Menciptakan kebaikan diantara semua orang;
- 4) Mengurangi kesenjangan pendapatan dan kekayaan;
- 5) Pemanfaatan lebih baik terhadap sumber daya dan asset;
- 6) Memberikan harapan pada orang lain melalui pemberian.

Diperkuat denganya ukuran prioritas bagi masyarakat yang berada dalam garis kemiskinan dan kefakiran, karena golongan ini retan terhadap kekufuran yang secara umum dapat dilihat dari urutan dalam 8 *golongan*.

### **G. Konsep Beras Miskin (*Raskin*)**

#### **1. Program Beras untuk Keluarga Miskin (*RASKIN*)**

Beras raskin adalah bagian dari program penanggulangan kebutuhan hidup bagi masyarakat miskin yang berada pada kluster 1 yaitu kegiatan perlindungan sosial berbasis keluarga dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok bagi masyarakat kurang mampu. Adapun yang dimaksud dengan program raskin dalam penelitian ini adalah program penanggulangan kemiskinan kluster satu, termasuk program bantuan sosial berbasis keluarga yang sudah berjalan secara rutin sejak tahun 1998.<sup>24</sup>

Melalui program ini pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat miskin untuk mendapatkan hak atas pangan. Jika rata-rata konsumsi beras nasional sekitaran 11.370 kilogram pertahun maka kontribusi beras bantuan ini sangat besar untuk kebutuhan masyarakat setiap bulanya khususnya bagi RTS. Program raskin ini tergolong program nasional. Program ini melibatkan berbagai pihak baik secara

---

<sup>24</sup>“Bulog”, Sekilas Raskin, Situs Resmi, [http://www.bulog.co.id/sekilasaraskin\\_v2php](http://www.bulog.co.id/sekilasaraskin_v2php), (diakses tanggal 23 September 2018)

umum maupun semua sektor terkait yang memiliki tanggung jawab dan wewenang sesuai dengan porsinya masing-masing dalam pelaksanaan program raskin dan yang terkait penetapan data RTS.

Program Raskin mengacu pada data RTS hasil PPLS 2011 BPS. Yang ditetapkan oleh TNP2K menggunakan *system basic* data terpadu perlindungan sosial. Secara vertikal program raskin bukan semata-mata program semata, akan tetapi pemerintah daerah memiliki tanggung jawab secara proposional. Dalam hal ini pemerintah pusat berperan dalam membuat kebijakan nasional, sedangkan dalam pelaksanaan dan penyalurannya sangat tergantung pada peran pemerintah daerah.

Adapun tujuan program raskin adalah mengurangi beban pengeluaran KPM dalam mencukupi kebutuhan pangan beras. Sasaran program raskin adalah berkurangnya pengeluaran KPM dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi dengan alokasi sebanyak 10 kg/KPW/bulan atau sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat.<sup>25</sup>

Manfaat program raskin adalah sebagai berikut :

- 1) Peningkatan ketahanan pangan ditingkat KPM, sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
- 2) Peningkatan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di TD), maupun ekonomi (harga jual beli yang terjangkau) kepada KPM;
- 3) Sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi;

---

<sup>25</sup>Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, *Pedoman Umum subsidi Rastra*, (Jakarta Pusat : Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 2017), 12.

- 4) Stabilitas harga beras dipasaran;
- 5) Pengendalian inflasi melalui intervensi pemerintah dengan menetapkan harga beras bersubsidi sebesar 10/kg atau sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat, dan menjaga stok pangan nasional;
- 6) Membantu pertumbuhan ekonomi di daerah.<sup>26</sup>

## **2. Dasar Hukum Raskin**

- 1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
- 2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah menjadi undang-undang (Lembar Negara REPUBLIK Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, tambahan lembar Nomor 5587);
- 5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017;
- 6) Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2015 tentang ketahanan pangan dan gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 60, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
- 7) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan kemiskinan diubah dengan peraturan presiden nomor 96 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan;
- 8) Presiden Presiden Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi Kementrian Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
- 9) Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah tahun 2017;

---

<sup>26</sup>Ibid., 14.

- 10) Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum(perum) Bulog dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional;
- 11) Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah;
- 12) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Daerah;
- 13) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi/Kota;
- 14) Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tenaga kesejahteraan Sosial Kecamatan.<sup>27</sup>

Pengelolaan dalam rangka pelaksanaan program raskin diciptakan harmonisasi dan sinergitas antar kementerian lembaga (K/L) terkait dalam pelaksanaan program serta pertanggung jawabannya, sehingga dapat dicapai hasil efektif. Sebab implementasinya maka dibentuk tim pengelolaan raskin di Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan pelaksanaan distribusi raskin di Desa/Kelurahan/pemerintahan setingkat. Perencanaan dan penganggaran program raskin mengacu pada Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun berjalan. Sumber pembiayaan program ini berasal dari APBN Tahun berjalan untuk subsidi harga beras.<sup>28</sup>

Titik distribusi yaitu tempat pendistribusian beras tingkat Kelurahan/Desa yang terdekat dengan keluarga sasaran penerima manfaat, yang ditentukan atas dasar kesepakatan dengan keluarga sasaran penerima manfaat, dan instansi pelaksana raskin yang terkait sesuai dengan tingkat wilayahnya.

---

<sup>27</sup>Ibid., 15.

<sup>28</sup>Ibid., 26.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan pendekatan penelitian**

Berdasarkan latar belakang dari rumusan masalah yang telah diuraikan, maka jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang bertujuan mendeskripsikan hasil temuan dengan kata-kata tanpa uji statistik, untuk mendapatkan hasil pembahasan yang valid dan penyajian yang akurat.

Metode deskriptif ini dilakukan melalui proses penyaringan informasi dari kondisi sewajarnya dalam kegiatan suatu obyek, dihubungkan dengan langkah pemikiran rasional baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis. Setiap data atau informasi yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mengetahui keterkaitannya dengan permasalahan pokok sehingga pada akhirnya bisa ditarik suatu kesimpulan secara obyektif.

Alasan menggunakan pendekatan kualitatif dalam proposal skripsi ini karena pada penelitian ini bersifat mendeskripsikan atau menggambarkan “Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Penyaluran Bantuan Beras Raskin (Raskin) di Desa Rarampadende Kecamatan Dolo Barat Kabupaten Sigi. Penelitian yang bersifat deskriptif menurut Suharsimi Arikunto lebih tepat apabila menggunakan pendekatan kualitatif.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Ilmiah, Suatu pendekatan praktik*(Cet IX; Jakarta : Rineka Cipta, 1993), 209.

### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian di laksanakan di Desa Rarampadende Kecamatan Dolo Barat Kabupaten Sigi. Adapun lokasi penelitian yang menjadi sumber data terkait dengan pendistribusian raskin yaitu Kantor Desa.

### **C. Kehadiran Peneliti**

Penulis sebagai peneliti ketika melakukan penelitian memperkenalkan identitas diri penulis dan memberitahukan maksud dan mewawancarai para informan untuk pengumpulan data ini. Hal ini dimaksudkan agar informan mengetahui keberadaan penulis sebagai peneliti, sehingga mereka dapat memberikan informasi dengan valid.

Sebagai bagian dari instrumen penelitian, penulis mengumpulkan berbagai data, dengan bergaul langsung dengan sebagian pihak staf pegawai Kantor Desa, panitia penyaluran raskin dan masyarakat penerima raskin.

#### **D. Data dan Sumber Data**

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini dapat dikategorikan menjadi dua bentuk, yaitu data primer dan data sekunder.

##### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh melalui pengamatan langsung di lapangan, wawancara melalui narasumber atau informan yang dipilih. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah warga yang tercatat sebagai penerima manfaat raskin di Desa Rarampadende Kecamatan Dolo Barat Kabupaten Sigi.

##### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder. Data sekunder bisa berupa data yang diperoleh melalui dokumen dan catatan-catatan yang berkaitan dengan objek penelitian yang menunjukkan informasi atau data tambahan yang memperkuat data pokok. Dalam proposal skripsi yang dijadikan sumber data sekunder adalah buku referensi yang berhubungan dengan pelaksanaan program tersebut.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

##### **1. Observasi**

Dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung di lapangan. Hal ini dilakukan karena peneliti mengamati bagaimana penyaluran beras raskin di Desa Rarampadende Kecamatan Dolo Barat Kabupaten Sigi ini, baik itu berkaitan dengan waktu prosesi pelaksanaannya. Hal ini bertujuan memberikan arah bagi peneliti dalam hal mengumpulkan data. Teknik observasi merupakan metode



pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap objek yang diteliti. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Cholid Narbukon, alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dalam mencari secara sistematis gejala-gejala yang yang diselidiki.<sup>2</sup> Dengan demikian pelaksanaan penelitian diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih tertib dan terarah.

## **2. Wawancara**

Yaitu suatu teknik dalam pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan tanya jawab dan bertatap muka antara peneliti dan informan. Dengan menggunakan alat yang digunakan pedoman wawancara, metode ini digunakan untuk mengetahui informasi secara langsung dan mendalam terhadap objek yang diteliti, yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk transkrip dari hasil wawancara yang dilakukan.

## **3. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transaksi, buku, surat kabar, majalah, tesis, makalah, jenis-jenis karya tulis, agenda dan sebaliknya. Dalam skripsi ini penulis menggunakan dokumentasi yang langsung diambil dari obyek penelitian (Kantor Desa Rarampadende) berupa arsip Kantor Desa.

---

<sup>2</sup>Cholid Narbukon, AbuAchmadi, *Metodologi Penelitian*, (Cet.IV;Jakarta:Bumi Aksara,2002), 70.

## **F. Analisis Data**

Data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah:

### **1. Reduksi Data**

Menurut Matthew B. Milos dan A. Michel Huberman bahwa ;

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemutusan perhatian dan penyederhanaan, transformasi data “*kasar*” yang muncul dari catatan-catatan tertentu di lapangan. Reduksi data berlangsung terus menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung.<sup>3</sup>

Reduksi data diterapkan pada hasil observasi, wawancara, dokumentasi dan penarikan kesimpulan. Hal ini dimaksudkan untuk menghilangkan kata-kata yang dianggap penulis tidak signifikan bagi penelitian ini.

### **2. Penyajian Data**

Penyajian data maksudnya adalah menyajikan data yang telah direduksi dalam model-model tertentu untuk menghindari adanya kesalahan penafsiran terhadap data tersebut. Menurut Matthew B. Milos dan A. Michel Huberman bahwa:

“Alur penting yang kedua dari kegiatan analisis adalah penyajian data, kami membatasi suatu “penyajian” sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian-penyajian, kita akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh menganalisis atautkah mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian tersebut”<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Matthew B. Millos, et al, *Qualitative Data Analisis diterjemahkan oleh Tjetjep Rohidi dengan Judul Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode Baru* (Cet. I; Jakarta: UI-Press,2005), 16.

<sup>4</sup>Ibid., 17.

### 3. *Verifikasi Data dan Penarikan Kesimpulan*

Verifikasi data artinya memeriksa kembali data yang telah disajikan sehingga penyajian dan pembahasan lebih akurat. Teknik verifikasi data dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu:

- a. Deduksi, yaitu analisis yang berangkat dari data yang bersifat umum untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus.
- b. Induksi, yaitu analisis yang berangkat dari data yang bersifat khusus untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum.
- c. Komparatif, yaitu analisis yang membandingkan beberapa data untuk mendapatkan kesimpulan persamaan maupun perbedaan.

### G. *Pengecekan Keabsahan Data*

Sebagaimana dikemukakan oleh Lexi J. Moleong dalam buku “metodologi penelitian kualitatif” bahwa:

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (*validitas*) dan keandalan (*reliabilitas*) menurut versi “positivisme” dan disesuaikan dengan tuntunan pengetahuan, kriteria dan paradigmanya sendiri.<sup>5</sup>

Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan berdasarkan pada sejumlah kriteria keabsahan data yang biasa digunakan yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keterlihatan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*).<sup>6</sup>

Selanjutnya untuk mengecek keabsahan data yang diperoleh maka dilakukan melalui cara triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang

---

<sup>5</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 171.

<sup>6</sup>Ibid., 173.

memanfaatkan sesuatu yang lain, di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data.

Denzin dan Moleong, membedakan empat macam triangulasi diantaranya dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori.

1. Triangulasi dengan sumber ; berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.
2. Triangulasi dengan metode; terdapat dua strategi, yaitu : (a) pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan, (b) pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.
3. Triangulasi penyidik ; ialah dengan jalan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data. Memanfaatkan pengamat lainnya membantu mengurangi kemencengan dalam pengumpulan data. Atau dengan cara lain ialah dengan membandingkan hasil pekerjaan seorang analisis dengan analisis lainnya.
4. Triangulasi dengan teori; hal ini dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori dan dinamakan penjelasan banding (*rival explanation*).

Di samping penulis gunakan berbagai kriteria dan triangulasi untuk pengecekan keabsahan data di atas juga penulis melakukan pembahasan melalui diskusi dengan rekan-rekansejawat. Hal ini digunakan karena merupakan salah

satu teknik untuk pengecekan keabsahan data dalam suatu penelitian. Diskusi dengan rekan-rekan sejawat dilakukan untuk mempertahankan agar penulis tetap tegar mempertahankan sikap terbuka dan kejujuran dari data yang dikumpulkan serta membantu penulis untuk tetap konsisten dan fokus terhadap pokok permasalahan yang dibahas.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. GAMBARAN UMUM DESA RARAMPADENDE**

##### **1. Sejarah Desa**

Budaya masyarakat tanah Kaili sangat dikenal sebutan Madika (Raja) dimana pada tahun 1916 terjadi pengungsian besar-besaran warga Tawaeli ke arah selatan Kota Palu dikarenakan oleh pertikaian antara pemerintah kolonial Belanda dengan Madika (Raja) Tawaeli maka sampailah mereka di Desa Sigampa (Kaleke sekarang) oleh Madika (Raja) di Wilayah Sigampa (Kaleke) menganjurkan untuk segera masuk kedalam (Rara) untuk membuka pemukiman dan lahan pertanian baru maka para pengungsi tersebut berangkat ke sebelah selatan Desa Sigampa namun diperjalanan terjadi sesuatu dimana daerah yang dilalui sangat angker sehingga para pengungsi tersebut berlari-lari kecil (Nodende) masuk ke dalam wilayah yang baru untuk membuka pemukiman dan pertanian, pada saat itu pula warga asli yang berada di sebelah timur wilayah baru tersebut yaitu Dolaa, Tuva dan Lene membaaur dengan para pendatang untuk membuka lahan pemukiman dan pertanian baru. Sebagian bukti 50 % warga Rarampadende adalah keturunan warga Tawaeli (Kayumalue).<sup>1</sup>

Pada tahun 1917, beberapa orang tua memperjuangkan Desa ini untuk berdiri sendiri yang disebut dengan Kampung Rarampadende yang artinya Rara

---

<sup>1</sup> Dokumen, Data Kantor Desa Rarampadende, Kecamatan Dolo Kab. Sigi, 5 April 2019

adalah dalam dan Dende adalah berlari kecil. Untuk berdiri sendiri antara lain sebagai berikut :

1. Nama : Toma Tandu (Tombolotutu)
2. Nama : Ranggepala

Mereka berdua meghadap Swapraja Sigi Dolo lalu ke Donggala menghadap Residen untuk memperjuangkan Kampung ini untuk menjadi Kampung Rarampadende. Akhirnya permohonan tersebut diterima, pada tahun itu pula yaitu 1917 resmi menjadi Desa Definitif yaitu Desa Rarampadende.<sup>2</sup>

Adapun Pejabat Kepala Desa Rarampadende sejak terbentuknya tahun 1917 sampai saat ini adalah sebagai berikut :<sup>3</sup>

No	Periode	Nama Kepala Desa
1	1917 – 1927	TOMBOLOTUTU (TOMA TANDU)
2	1927 – 1935	RANGGEPALA AJITONDE
3	1935 – 1940	MATIRANTE (TOIBENGGE)
4	1940 – 1949	TODO LAWADJU
5	1949 – 1954	TOTOH DATUPAMUSU
6	1954 – 1957	MALAHUKU
7	1957 – 1959	INTJE ARBE DATUPALINGE
8	1959 – 1969	I.H MAKANU
9	1969 – 1972	DJAMALUDIN LATADENGKO
10	1972 – 1977	DST H. DG. MAROTJA
11	1977 – 1978	ASNUDIN ANDI TJALA
12	1978 – 1979	AHYAR BUDO HASAN
13	1979 – 1987	MOH. SALEH

---

<sup>2</sup> Sumber totua Kampung Rarampadende

<sup>3</sup> Dokumen, Data Kantor Desa Rarampadende, Kecamatan Dolo Kab. Sigi Tahun 2015-2017

14	1987 – 1992	DST H. DG. MAROTJA
15	1992 – 2000	NDJULI LABIDO
16	2000 – 2008	SENERMAN LAWADJU
17	2008 – 2009	ASWADIN TOMBOLOTUTU
18	2009 – 2010	DJAYADIN DJ
19	2010 – 2016	IKRAN NUHULI A.Ma
20	2016 - Sekarang	AL' AOFIN LIDO

## 2. Kondisi Geografis Desa Rarampadende

### a) *Letak dan Luas Desa Rarampadende*

Desa Rarampadende memiliki luas wilayah yang cukup besar yaitu 5.196,02 Km, serta daerah administratif Desa Rarampadende jika menilik ke Desa lainnya yang terdapat di Kecamatan Dolo Barat adalah menjadi salah satu desa yang memiliki wilayah administratif terluas. Dengan demikian, dengan besarnya wilayah yang harus dikembangkan oleh Pemerintahan Desa Rarampadende maka hal itu dirasa akan cukup membantu dalam meningkatkan potensi yang terdapat di Desa Rarampadende pada masa ke masa.<sup>4</sup>

Secara geografis Desa Rarampadende merupakan salah satu Desa di Kecamatan Dolo Barat yang mempunyai luas wilayah mencapai 5.196,02 Km. Dengan jumlah penduduk Desa Rarampadende sebanyak 2.008 Jiwa. Desa Rarampadende merupakan salah satu Desa dari 12 (dua belas) Desa yang ada di kecamatan Dolo Barat Kabupaten Sigi, Desa Rarampadende berada pada ketinggian ± ..... dpl dan curah hujan ± 1681 mm, rata-rata

---

<sup>4</sup> Dokumen, *Data Monografi*, Kantor Desa Rarampadende, Kecamatan Dolo Kab. Sigi, 7 April 2019



suhu udara 22° - 35° celcius. Bentuk wilayah berombak hanya 1%. Desa Rarampadende terletak di sebelah Timur Kecamatan Rancabungur yang apabila ditempuh dengan memakai kendaraan hanya menghabiskan waktu selama ± 15 menit. Terbagi menjadi Empat Dusun, yakni: Dusun I, II, III dan Dusun IV dengan perbatasan wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Desa Kaleke
- b. Sebelah Barat : Desa Balumpewa dan Desa Balamoa
- c. Sebelah Selatan : Desa Luku
- d. Sebelah Timur : Desa Maku

Dilihat dari elevasi, wilayah Desa Rarampadende 10% berada pada ketinggian antara 100 meter diatas permukaan laut, Elevasi tersebut menggambarkan bahwa Desa Rarampadende merupakan wilayah dataran rendah dan tanah datar diapit oleh dua bukit. Selain itu, Desa Rarampadende juga termasuk dalam wilayah Kecamatan Dolo Barat sehingga memiliki orbitasi yang cukup dekat dengan wilayah-wilayah strategis yang ada di Kab. Sigi. Berikut data sebaran 4 (Empat) Dusun pada Desa Rarampadende :

Tabel 4.1

Data Sebaran Dusun Dalam Desa Rarampadende Tahun 2017

No.	Dusun	Jumlah RT	Jarak dari Kantor Desa Rarampadende
1.	I	5	300 Meter

2.	II	2	0 Meter
3.	III	2	200 Meter
4.	IV	1	500 Meter

(Sumber : Hasil Pengkajian Desa Rarampadende, 2017)

Selanjutnya data jarak tempuh Desa Rarampadende ke wilayah strategis seperti ke Ibu kota Kecamatan, Ibukota Kabupaten dan Ibukota Kecamatan lainnya adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2

Jarak Tempuh Desa Rarampadende Ke Wilayah Strategis Tahun 2017

No	Dari	Ke Ibukota	Jarak Tempuh	Waktu	Angkutan
1.	Desa Rarampadende	Provinsi Sul-Teng	20 Km	30 mnt	Darat
2.	Desa Rarampadende	Kabupaten Sigi	15 Km	15 mnt	Darat
3.	Desa Rarampadende	Kec. Dolo Barat	1 Km	1 mnt	Darat
4.	Desa	Kec. Dolo Selatan	10 Km	10 mnt	Darat

	Rarampadende				
5.	Desa Rarampadende	Kec. Dolo	7 Km	7 mnt	Darat

(Sumber : Hasil Pengkajian Desa Rarampadende, 2017)

## 5. Visi dan Misi Desa Rarampdende

### 1. Visi

- Terwujudnya masyarakat yang maju, sejahtera, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dalam tatanan pemerintah yang transparan, partisipatif, dalam pembangunan berkelanjutan dengan Mempertahankan Keamanan dan Ketertiban
- Terwujudnya Desa Rarampadende yang aman, cerdas, berdaya saing dan terbangunnya tata kelola pemerintahan desa yang baik guna mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

### 2. Misi

- a. Membangun kebersamaan, keterbukaan, kesepahaman antara Pemerintah Desa dan Masyarakat serta mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungan Desa Rarampadende;
- b. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan mulai dari pengendalian, pengawasan dan meningkatkan kesehatan, kebersihan Desa serta mengusahakan jaminan kesehatan perangkat Desa dan masyarakat melalui program pemerintah;

- c. Mendorong masyarakat mampu menyuarakan keinginannya, semangat dan nilai-nilai Pancasila, etika, serta norma-norma adat istiadat yang berlaku.
- d. Menciptakan suasana aman, tentram, tertib, dan tidak diskriminatif di semua aspek, meningkatkan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat Desa dan daya saing Desa;
- e. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia beretika dan bermoral melalui pendidikan agama, umum dan keterampilan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dengan mewujudkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan program lain untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat Desa untuk meningkatkan produksi rumah tangga kecil;
- f. Melaksanakan pembangunan dengan tetap memperhatikan kearifan lokal dan kelestarian lingkungan, meningkatkan sarana dan prasarana dari segi fisik, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan kebudayaan di Desa
- g. Mengedepankan kejujuran, keadilan, transparansi dalam kehidupan sehari-hari baik dalam pemerintahan maupun dengan masyarakat Desa.

#### **4. Keadaan Sosial, Ekonomi Masyarakat Desa Rarampadende**

##### a) Keadaan Sosial

Kondisi pendidikan masyarakat suatu wilayah dapat menunjukkan indeks pembangunan manusia di wilayah tersebut. Kondisi pendidikan di Desa

Rarampadende masih termasuk kategori Sedang karena masih tingginya masyarakat Desa Rarampadende tidak menyelesaikan pendidikan dasar sebesar 578 Orang, sementara masyarakat yang telah menyelesaikan pendidikan dasar sampai dengan perguruan tinggi hanya sebesar 695 Orang. Kondisi pendidikan masyarakat Desa Rarampadende secara rinci tersaji pada tabel berikut ini :

Tabel 4.3

## Data Kondisi Pendidikan Masyarakat Desa Tahun 2017

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Org)	Keterangan
1.	- Belum Sekolah (Balita)	197	
2.	- Usia 15-45 tidak pernah sekolah	538	
3.	- Pernah SD tapi tidak Tamat		
4.	- Tamat SD/Sederajat	225	
5.	- Tamat SLTP/Sederajat	214	
6.	- Tamat SMA/Sederajat	208	
7.	- Tamat D.I	3	
8.	- Tamat D.II	-	
9.	- Tamat D.III	15	
10.	- Tamat D.IV/S1	20	
11.	- Tamat S2	18	
	- Tamat S3	1	
	TOTAL	1,439	

*(Sumber : Hasil Pengkajian Desa Rarampadende, 2017)<sup>5</sup>*

Dari tabel tersebut, terlihat masih rendahnya kompetensi yang dimiliki masyarakat Desa Rarampadende karena tingkat pendidikan yang relatif masih rendah. Hal ini menjadi permasalahan yang harus segera diatasi oleh Pemerintah Desa Rarampadende bersama masyarakat desa, karena dengan peningkatan taraf pendidikan masyarakat tentunya akan berdampak pada kemajuan pembangunan Desa Rarampadende.

*b) Keadaan Ekonomi Masyarakat Desa Rarampadende*

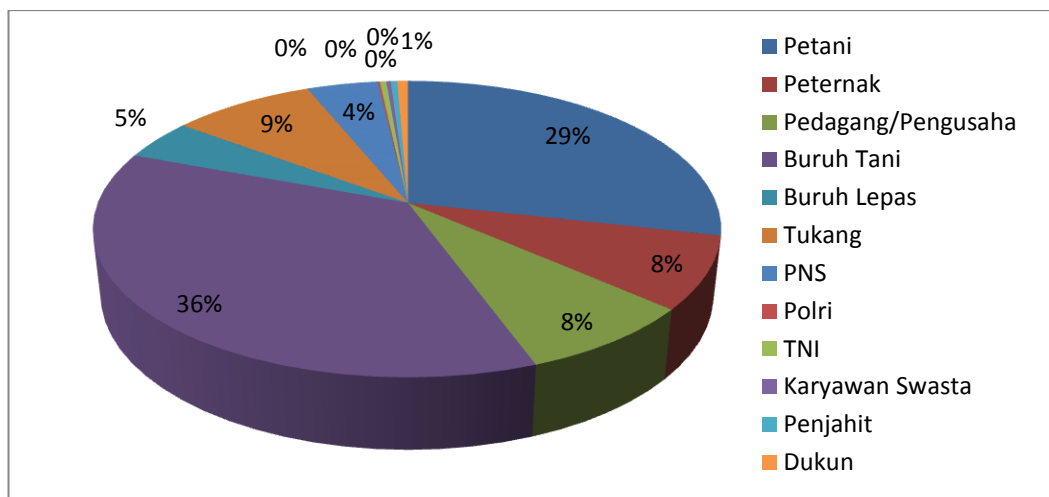
Masyarakat Desa Rarampadende secara umum memiliki potensi pada sektor perkebunan dan peternakan sehingga masyarakat desa sejak zaman dulu telah melakukan pemanfaatan kedua potensi tersebut yang pada akhirnya membentuk pengetahuan atau kompetensi masyarakat desa secara otodidak pada sektor pertanian dan peternakan. Hal ini sangat mempengaruhi jenis mata pencaharian atau pekerjaan yang digeluti oleh masyarakat Desa Rarampadende, secara umum masyarakat Desa Rarampadende bekerja sebagai Petani, dan Peternak untuk mengetahui lebih jelas mata pencaharian masyarakat Desa Rarampadende dapat dilihat pada Diagram dibawah ini :

---

<sup>5</sup> Dokumen, Data Kantor Desa Rarampadende, Kecamatan Dolo Kab. Sigi, 5 April 2019

## Daftar Diagram 4.1

Data Mata Pencaharian/Pekerjaan Masyarakat Desa Rarampadende Tahun 2017



Daftar Tabel 4.4

Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
Petani	217
Peternak	60
Pedagang/Pengusaha	61
Buruh Tani	276
Buruh Lepas	34
Tukang	66
PNS	33
Polri	1
TNI	3
Karyawan Swasta	2
Penjahit	3
Dukun	5

(Sumber : Hasil Pengkajian Desa Rarampadende, 2017)

Pengkajian desa juga dilaksanakan untuk mengetahui hasil produksi yang dihasilkan oleh masing – masing pekerjaan yang digeluti oleh masyarakat Desa

Rarampadende, berikut beberapa hasil produksi yang dirata-ratakan setiap tahunnya dari beberapa potensi Desa Rarampadende.<sup>6</sup>

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa hasil produksi dari beberapa sektor potensi Desa Rarampadende belum terkelola dengan baik. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap tingkat pendapatan serta kesejahteraan masyarakat desa, untuk itu perlu dipikirkan cara atau teknik pengelolaan, pemanfaatan dan pelestarian potensi – potensi desa tersebut agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan asli Desa Rarampadende.

Kondisi pekerjaan dan kesejahteraan masyarakat Desa Rarampadende yang masih jauh dari kata sejahtera merupakan permasalahan yang kompleks dan perlu penanganan yang terencana, terukur dan efisien. Pemerintah Desa Rarampadende bersama masyarakat perlu meningkatkan kompetensi dan menciptakan peluangnya untuk sejahtera dengan memanfaatkan potensi desa yang dimiliki dan penyelarasan kebijakan pembangunan dengan Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pusat.

## **5. Keadaan penduduk Desa Rarampadende**

Desa Rarampadende memiliki jumlah penduduk sebesar 2008 jiwa berdasarkan hasil pendataan Pemerintah Desa pada Tahun 2017. Struktur penduduk Desa Rarampadende menurut jenis kelamin adalah sebesar 1038 Orang Laki – Laki dan 970 Orang Perempuan dengan jumlah Kepala Keluarga sebesar 593 KK. Struktur penduduk Desa Rarampadende tersaji dalam tabel dibawah ini

---

<sup>6</sup> Dokumen, Data Kantor Desa Rarampadende, Kecamatan Dolo Kab. Sigi, 5 April 2019



Tabel 4.5

Data Struktur dan Penyebaran Penduduk Desa Rarampadende Tahun 2017

No	Dusun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	KK
1.	Dusun I	427	385	812	248
2.	Dusun II	258	253	511	161
3.	Dusun III	213	205	418	115
4.	Dusun IV	140	127	267	69

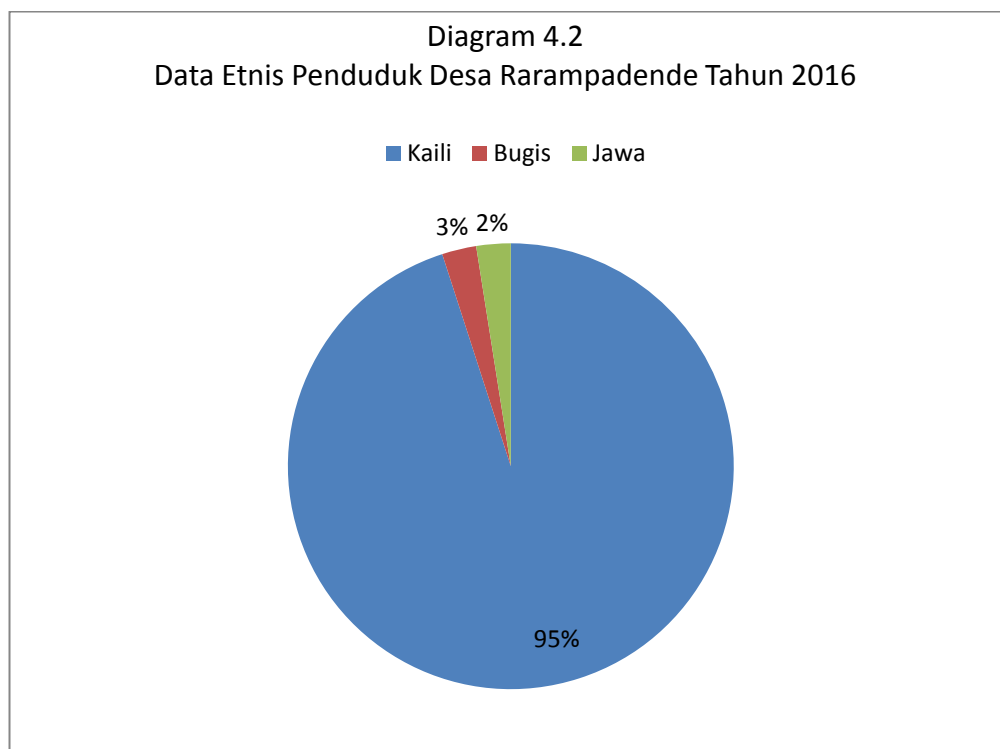
*Sumber : Pengkajian Desa Rarampadende, 2017<sup>7</sup>*

Berdasarkan tabel 1.4 diatas, terlihat bahwa penyebaran penduduk terbesar Desa Rarampadende berdomisili pada Dusun I dengan jumlah sebesar 812 Orang, kemudian penduduk Desa Rarampadende paling kecil berdomisili pada Dusun 4 dengan jumlah sebesar 267 Orang. Jumlah Kepala Keluarga sebesar 593 KK dan Desa Rarampadende sampai saat ini masih memiliki Rumah Tangga Miskin sebesar 180 RTM.

## 6. Keadaan Keagamaan Desa Rarampadende

Desa Rarampadende memiliki penduduk yang mayoritas memeluk agama Islam, hal ini terlihat dari data yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Rarampadende tentang kepercayaan masyarakat, secara rinci data mengenai etnis yang terdapat di Desa Rarampadende tersaji pada diagram berikut :

<sup>7</sup> Dokumen, Data Kantor Desa Rarampadende, Kecamatan Dolo Kab. Sigi, 5 April 2019



Daftar Tabel 4.6

Data Etnis Penduduk Desa Rarampadende Tahun 2016

Etnis Penduduk	Jumlah
Kaili	1908
Bugis	50
Jawa	50

(Sumber : Hasil Pengkajian Desa Rarampadende, 2017)<sup>8</sup>

Besarnya penduduk yang memeluk agama Islam sangat mempengaruhi adat istiadat dan aktifitas sosial masyarakat Desa Rarampadende, hal ini terlihat dari penyelenggaraan kegiatan – kegiatan oleh masyarakat yang bernuansa Islami seperti setiap tahunnya diadakan perayaan Maulid Nabi, Hari Raya Idul Fitri, Pasar Ramadhan, Hari Raya Idul Adha, Pengajian/Barsanji dan kegiatan lainnya

<sup>8</sup> Dokumen, Data Kantor Desa Rarampadende, Kecamatan Dolo Kab. Sigi, 8 April 2019

dalam rangka memperingati hari besar nasional maupun daerah. Adapun beberapa kegiatan kesenian yang selalu diadakan setiap tahun yaitu musik rebana.

## 7. Keadaan Sarana dan Prasarana Desa Rarampadende

Sarana dan prasarana umum atau fasilitas publik merupakan modal yang sangat penting dimiliki dan dikelola oleh desa dengan prinsip kekeluargaan, kegotongroyongan, transparan, akuntabel, efisien dan lestari agar dapat memberikan perubahan positif dalam pencapaian cita – cita desa yaitu kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Berikut data fasilitas publik yang dimiliki Desa Rarampadende :

Tabel 4.5

Data Sumber Daya Pembangunan Desa Rarampadende Tahun 2016

No.	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Jumlah	Satuan
1.	Aset Prasarana Umum		
	a. Jalan	5	Km
	b. Jembatan	1	Unit
	c. Plat Deker	16	Unit
2.	Aset Prasarana Pendidikan :		
	a. Gedung PAUD	-	-
	b. Gedung TK	2	Unit
	c. Gedung TPA	1	Unit

3.	Aset Prasarana Kesehatan :		
	a. Posyandu	1	Unit
	b. Polindes	1	Unit
	c. MCK	4	Unit
	d. Air Bersih	70	Unit
4.	Aset Prasarana Ekonomi :		
	a. Pasar Desa	-	-
	b. Tempat Pelelangan Ikan	-	-
5.	Kelompok Usaha Ekonomi Produktif :		
	a. Jumlah Kelompok Usaha	-	Kelompok
	b. Jumlah Kelompok Usaha Aktif	-	Kelompok
	c. Jumlah Kelompok Usaha Nonaktif	-	-
6.	Aset Berupa Modal :		
	a. Total Aset Produktif	-	-
	b. Total Pinjaman di Masyarakat	-	-

(Sumber : Hasil Pengkajian Desa Rarampadende, 2017)<sup>9</sup>

Beberapa jenis aset yang belum dimiliki Desa Rarampadende yang berkaitan langsung dengan pelayanan atas kebutuhan dasar masyarakat yaitu sektor Pendidikan, Kesehatan, Sosial Budaya dan Perekonomian agar segera disediakan karena dengan lengkapnya sarana dan prasarana tersebut akan sangat bermanfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa menuju kesejahteraan.

## 8. Struktur Organisasi Desa Rarampadende

<sup>9</sup> Dokumen, Data Kantor Desa Rarampadende, Kecamatan Dolo Kab. Sigi, 8 April 2019



## **B. Mekanisme Penyaluran Bantuan Raskin Di desa Rarampadende Kecamatan Dolo Barat Kabupaten Sigi**

### 1. Sejarah Raskin

Penyaluran Beras Miskin (Raskin) sudah dimulai sejak tahun 1998. Sejak krisis moneter tahun 1998 merupakan awal pelaksanaan Beras Miskin yang bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan rumah tangga terutama rumah tangga miskin. Pada awalnya disebut program Operasi Pasar Khusus (OPK), kemudian diubah menjadi raskin mulai tahun 2002. Fungsi beras miskin (raskin) di perluas sehingga tidak lagi menjadi program darurat melainkan bagian dari program perlindungan social masyarakat. Melalui program diharapkan akan menjadi tepat sasaran dan mencapai tujuan raskin.

Pembangunan social juga dapat dilihat kaitanya dalam rangka upaya mewujudkan cita-cita Negara kesejahteraan. Konsep tersebut bersumber dari pemahaman tentang fungsi Negara. Dalam kesejahteraan Negara tidak hanya bertugas memelihara ketertiban dan menegakkan hokum, tetapi terutama adalah meningkatkan kesejahteraan warganya. Dalam pandangan tersebut, Negara dituntut untuk berperan aktif dalam mengusahakan kesejahteraan rakyatnya, yang didorong oleh pengakuan atau kesadaran bahwa rakyat berhak memperoleh kesejahteraan sesuai harkat dan martabatnya sebagai manusia. Dalam banyak hal, hal rakyat

untuk memperoleh kesejahteraan ini juga akan terkait dengan hak-hak asasi manusia.<sup>10</sup>

Di Indonesia sendiri upaya penanggulangan kemiskinan itu tercantum dalam tujuan Negara (pembukaan UUD 1945) dan secara spesifik dimuat dalam undang-undang Nomor 11 tahun 2009 pasal 19, 20, dan 21 tentang penanggulangan kemiskinan yang isinya : penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. Intinya tujuan dari pembangunan adalah untuk mencapai kesejahteraan.

Banyak upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi kemiskinan salah satunya melalui program beras miskin (Raskin). Raskin adalah merupakan subsidi pangan dalam bentuk beras yang diperuntukan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan social pada rumah tangga sasaran. Keberhasilan Program Raskin diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator 6T, yaitu : tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas dan tepat administrasi. Program ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras dan mencegah penurunan konsumsi energy dan protein.

---

<sup>10</sup><http://www.Bulog.co.id> diakses pada tanggal 2 mei 2019

Program Raskin adalah salah satu program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan social dibidang pangan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat berupa bantuan beras bersubsidi kepada rumah tangga berpendapatan rendah. Hal penting yang perlu diperhitungkan oleh pemerintah dan masyarakat selaku pengelola dan pelaksanaan bantuan beras miskin harus sesuai sistem dan prosedur administrasi. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi penyalagunaan baik oleh pengelolanya, maupun pelaksanaanya. Sehubungan dengan penelitian ini, system administrasi bantuan raskin yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan tersebut merupakan salah satu syarat mutlak yang harus dipenuhi mengingat bahwa dana bantuan raskin merupakan bantuan pemerintah yang diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu sehingga bantuan tersebut dapat digunakan sesuai dengan mekanisme penyaluran Raskin.

## **2. Mekanisme Penyalurn Raskin**

Dalam penyaluran raskin khususnya di Desa Rarampadende setahun menerima jatah raskin sebanyak 4 kali, tepatnya 3 bulan sekali. Sebelum melakukan penyaluran, dari pihak aparat desa telah melakukan pendataan, bagi masyarakat yang kurang mampu atau masyarakat miskin.

Menurut salah satu informan “ Ibu Hilda ” yang berhasil penulis wawancarai dilokasi penelitian menyatakan bahwa :

“Untuk penyaluran raskin dilakukan langsung oleh pihak bulog kesetiap Kantor desa, kemudian dari kantor desa pihak panitia raskin menghubungi



masyarakat penerima raskin agar segera mengambil jatah raskin mereka di kantor desa”<sup>11</sup>

Dari penjelasan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa beras miskin yang akan disalurkan kepada masyarakat di tempatkan di kantor desa, kemudian keluarga penerima raskin langsung mengambil di kantor desa. Sehingga program raskin yang merupakan salah satu program pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat miskin dapat dilaksanakan dengan baik, serta tersalurkan kepada yang berhak menerimannya.

Setelah Raskin terkumpul di Kantor desa, kemudian melakukan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui mekanisme penyaluran raskin. Adapun prosedur membaginya adalah masyarakat datang langsung ditempat pengambilan raskin tepatnya di kantor desa.<sup>12</sup>

### **3. KK yang Menerima Raskin**

Dalam menentukan masyarakat yang berhak menerima raskin pihak Panitia Raskin telah melakukan pendataan rumah tangga yang berhak menerima beras Raskin, yaitu masyarakat yang kurang mampu.

Berdasarkan data sensus tahun 2016-2017 yang diperoleh jumlah Rumah tangga miskin yang terdaftar penerima raskin berjumlah 157 KK dari 4 dusun di

---

<sup>11</sup> Hilda, Hasil Wawancara Panitia Raskin Pada tanggal 1 April 2019

<sup>12</sup> Hasil Observasi Mahasiswa IAIN Palu Di Kantor Desa Rarampadende, pada tanggal 1 April 2019

desa Rarampadende. Adapun pembagian jatah raskin dari masing-masing Dusun adalah sebagai berikut :

Daftar Tabel 4.6

Jumlah Penerima Raskin di Desa Rarampadende

NO	Uraian	Jumlah
1	Dusun I	70 KK
2	Dusun II	34 KK
3	Dusun III	31 KK
4	Dusun IV	22 KK
	Jumlah	157 KK

Sumber Data : Kantor Desa Rarampadende<sup>13</sup>

Dari masing-masing penerima manfaat beras miskin (raskin) sering kali menjadi persoalan yang rumit ditengah masyarakat dari hasil penelitian di desa Rarampadende khususnya Dusun IV , program raskin telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada namun, masih banyak masyarakat miskin yang belum mendapatkan jatah raskin.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu panitia penyaluran raskin Ibu Hilda mengatakan :

“sebenarnya rumah tangga yang resmi menerima raskin dari data TNP2K kecamatan khususnya Dusun IV yaitu 22 KK dengan jumlah beras 10 kg/bln per KK, Namun pada dusun IV masih ada beberapa masyarakat

---

<sup>13</sup>Dokumen, Kantor Desa Rarampadende Kecamatan Dolo Barat Kab. Sigi pada tanggal 1 April 2019

miskin yang belum mendapatkan beras miskin (raskin) karena mereka belum terdata dalam penerimaan manfaat beras miskin<sup>14</sup>

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa jumlah KK yang berhak menerima raskin adalah 22 KK, namun disebabkan masih banyaknya rumah tangga yang belum mendapatkan raskin yang berjumlah 23 KK, karena masih belum terdata dan masih kurangnya informasi, sehingga pendataan untuk penerima raskin ini belum merata kepada masyarakat yang membutuhkan .

Menurut keterangan salah satu informan Ibu Jati dari hasil wawancara dilokasi penelitian menyatakan bahwa :

“kami sangat bersyukur bantuan jatah raskin sudah sangat membantu dan mengurangi sedikit beban keluarga”<sup>15</sup>

Dari hasil wawancara diatas dapat diambil kesimpulan bahwa program raskin sudah sangat membantu masyarakat yang kurang mampu sehingga dapat mengurangi beban keluarga. Program raskin merupakan program penanggulangan kemiskinan yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan memberikan bantuan beras bersubsidi raskin bagi masyarakat miskin sehingga dapat membantu kebutuhan masyarakat. Namun masih banyak pihak-pihak yang belum mengetahui dan melaksanakan penyaluran bantuan raskin sesuai dengan keadilan dalam Islam.

### **C. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Mekanisme Penyaluran Bantuan Raskin Di desa Rarampadende, Kecamatan Dolo Barat Kabupaten Sigi**

Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam. Distribusi yang diajarkan Islam sangat urgen agar harta tidak menumpuk pada golongan tertentu

---

<sup>14</sup> Tahkim, Selaku ketua Panitia penyaluran Raskin”Wawancara” Pada tanggal 1 April 2019

<sup>15</sup> Jati Mudo, Warga Penerima Raskin, “Wawancara”, tanggal 4 April 2019

dalam masyarakat. Pemerintah diuntut untuk tidak berpihak pada satu kelompok atau golongan tertentu agar proses penyaluran dapat berjalan dengan adil.

Program penyaluran raskin yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam pandangan ekonomi Islam lahir dengan tujuan agar tersalurnya Raskin kepada yang berhak menerimanya, sehingga pihak-pihak yang bersangkutan khususnya masyarakat yang kurang mampu, bebanya dapat berkurang. Dengan berbagai kebijakan dan ketentuan tentang kebijakan ekonomi guna membangun kesejahteraan hidup masyarakat, maka distribusi dalam pandangan Islam harus didasarkan pada prinsip-prinsip dasar Ekonomi Islam.<sup>16</sup>

Di antaranya adalah kebebasan individu, adanya jaminan sosial, larangan menumpuk harta, dan distribusi kekayaan yang adil.<sup>17</sup> Secara umum ekonomi Islam mengarahkan mekanisme distribusi pendapatan berbasis moral atau tindakan yang memiliki nilai positif dan memelihara keadilan sosial pada setiap aktifitas ekonomi karena pada saat ini terjadi ketidakseimbangan distribusi kekayaan antara orang kaya dan orang miskin. Tujuan distribusi dalam Islam yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat serta keadilan dalam distribusi agar tidak terjadi ketidakseimbangan baik distribusi pendapatan, produk, dan harta serta untuk mengembangkan harta dan pembersihannya melalui zakat, mampu memberdayakan sumber daya manusia, dan tercapainya kesejahteraan ekonomi yang berkeadilan. Dalam ekonomi Islam harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Selalu menghiiasi amal dengan niat ibadah dan ikhlas

---

<sup>17</sup>[http://www. Wordpress com /Arif hoetoro, \*Ekonomi Islam, Pengantar Analisis Kesejarahan dan metodologi id. html\*](http://www.Wordpress.com/Arif%20hoetoro,%20Ekonomi%20Islam,%20Pengantar%20Analisis%20Kesejarahan%20dan%20metodologi%20id.%20html)

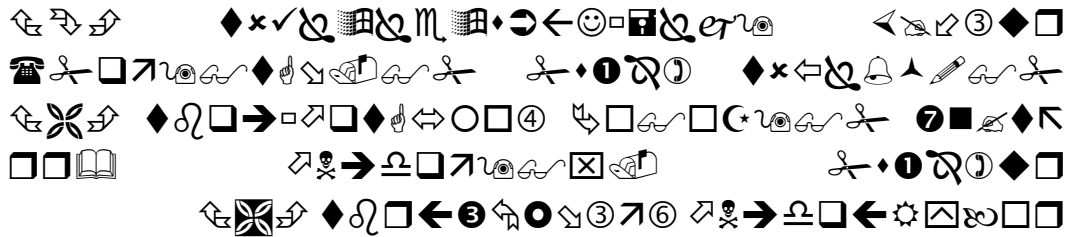
- b. Transparan dalam proses distribusi dan barang yang di distribusikan halal
- c. Bersikap adil dan tidak mengerjakan hal-hal yang dilarang dalam Islam
- d. Tolong menolong, toleransi dan bersedekah
- e. Larangan penimbunan barang

Berkaitan dengan penyaluran bantuan raskin di desa raraampadende ditinjau dari ekonomi Islam, maka penyaluran bantuan raskin di desa rarampadende belum tersalurkan secara maksimal kepada rumah tangga sasaran penerima manfaat, karena kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan raskin karna data yang diperoleh dari pihak panitia penyaluran raskin belum sepenuhnya terdata menyeluruh. Dalam hal ini kurangnya perhatian pemerintah desa serta data-data informasi kurang lengkap, menjadi penyebab tidak meratanya pendistribusian yang sebenarnya masih ada masyarakat yang kurang mampu belum mendapatkan raskin sehingga pembagiannya tidak terlaksana secara maksimal.

Distribusi pada zaman Rasulullah saw, banyak memberikan pengaruh yang besar sampai sekarang karena Rasulullah saw mengajarkan transaksi-transaksi perdagangan secara jujur, adil dan tidak membuat pelanggannya mengeluh dan kecewa. Rasulullah saw memberikan landasan-landasan salah satunya adalah adil. Adil yang dimaksud adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Seperti halnya pada penyaluran beras raskin harus meletakkan pada tempatnya maksudnya penyaluran raskin harus tepat sasaran untuk masyarakat miskin. Hal ini merupakan konsep keadilan yang harus ditetapkan dalam suatu mekanisme pasar

untuk menghindari hal-hal seperti kecurangan, dan penumpukan yang sangat dapat merugikan salah satu pihak.

Allah swt berfirman dalam (Q.S Al-Muthafifiin, {83} : 1-3



Terjemahannya :

“celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang). Yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan. Dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), maka mengurangi”<sup>18</sup>

Dari Ayat diatas Allah swt melarang orang-orang yang curang dalam menakar atau menimbang, disini sangat jelas pentingnya keadilan dalam distribusi.

---

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya (Surabaya : Al-Hidayah, 2002), h. 1053

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Program raskin muncul sebagai bentuk upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui usaha pemenuhan kebutuhan pangan untuk masyarakat yang kurang mampu atau miskin serta bertujuan mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sasaran. Pemerintah telah menetapkan indikator 6 T tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat harga, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Dalam melaksanakan penyaluran Raskin di desa Rarampadende masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya. Maka penulis sampai kepada kesimpulan, dengan mengemukakan beberapa catatan penting kemudian disusul dengan implikasi kepada masyarakat daerah penelitian dan masyarakat pada umumnya.

Adapun kesimpulan dari isi skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Mekanisme penyaluran bantuan raskin di desa Rarampadende setahun menerima jatah raskin sebanyak 4 kali, tepatnya tiga bulan sekali. Sebelum melakukan pembagian jatah raskin, dari pihak panitia raskin telah melakukan pendataan, bagi masyarakat yang kurang mampu atau miskin. Untuk penyaluran raskin dilakukan langsung oleh pihak bulog ke kantor desa ,
2. Dalam tinjauan ekonomi Islam, pendistribusian raskin yang ada di desa Rarampadende belum sesuai dengan ekonomi Islam, karena

masih belum terlaksana secara maksimal dikarenakan masih ada ketidaktepatan sasaran dalam pembagian raskin. Hal ini dapat dilihat dengan bertambahnya jumlah rumah tangga penerima beras miskin (Raskin) di luar dari yang terdaftar di TNP2K dan masih banyak masyarakat yang kurang mampu belum mendapatkan beras raskin karena saat pendataan masih ada masyarakat yang kurang mampu belum terdata. Dalam hal ini kurangnya perhatian dari pemerintah desa serta data-data informasi yang kurang lengkap, menjadi penyebab tidak meratanya pendistribusian, kurangnya perhatian dari pemerintah merupakan penyebab tidak meratanya pendistribusian.

## **B. Saran**

1. Diharapkan kepada pemerintah khususnya pihak panitia Raskin agar dapat memperbaiki kinerja mengenai pendistribusian beras raskin khususnya di desa Rarampadende Kecamatan Dolo Barat Kabupaten Sigi, agar permasalahan yang ada dalam pelaksanaan program bantuan raskin tersebut dapat di minimalisir
2. Diharapkan kepada pemerintah agar lebih tegas lagi dalam menetapkan aturan yang berlaku. Sehingga program raskin benar-benar di peruntukan bagi warga miskin.



## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Syamsul *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta : Raja GrafindoPersada, 2007.
- Arikunto, Suharsimi *Prosuder Penelitian Ilmiah, Suatu pendekatan praktik*, Cet IX; Jakarta : Rineka Cipta, 1993.
- B. Millos, Matthew, et al, *Qualitative Data Analisis diterjemahkan oleh Tjetjep Rohidi dengan Judul Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode Baru*, Cet. I; Jakarta: UI-Press, 2005.
- Beik, Irfan Syauqi dan Laily Dwi Arsyianti ,*Ekonomi Pembangunan Syariah*, (Jakarta : Raja GrafindoPersada, 2016.
- Edi D, Suharto, *Kemiskina ndan Perlindungan Sosial di Indonesia*, Bandung Alfabeta, 2009.
- Ernawati, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Cet 1 Bmedia 2017
- Hatta, Ahmad *Tafsir Qur'an Per Kata: Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul & Terjemahannya*, Cet. V ; Jakarta : Maghfirah Pustaka, 2009
- Kartasasmita, *UrbanisasidanKemiskinan*, (Yogyakarta :PustakaPelajar, 1999.
- Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, *Pedoman Umum subsidi Rastra*, Jakarta Pusat :Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusiadan Kebudayaan, 2017.
- Lukman Ali dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua, cetan ketujuh, Jakarta: Balai Pustaka, 1996
- Moleong Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. X; Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999.
- Narbukon,Cholid Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Cet.IV; Jakarta: Bumi Aksara,2002.
- Pedoman Umum (Pedum) Raskinpada Bab 1 Pendahuluan Raskin, 2013.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 , *Percepatan Penanggulangan Kemiskinan*,Pasal 5 ayat (1) dan Intruksi Presiden Nomor 3 tahun 2010, *Program Pembangunan yang Berkeadilan*,diktum kedua

Rahman, Afzalur *Economic Dokrines Of Islam*, terj. Soeroyo, Yogyakarta :Dhana Bakti Wakaf, 1995.

Remi, Sutyastie Soemitro dan Priyono Tjiptoheri jayanto. *Kemiskinan dan Ketidakmerataan di Indonesia*, Jakarta :PenerbitRinekaCipta, 2002.

Rozalinda, *Ekonomi Islam*, Jakarta :Raja GrafindoPersada, 2015.

Setya, Dewanta, Awan (ed.) *KemiskinandanKesenjangan di Indonesia*, Yogyakarta: Aditya Media, 2000.

Shihab, M. Quraish*Tafsir al- Mishbah*, vol. 14, Jakarta :LenteraHati, 2002.

### **Internet:**

BPS, “JumlahPenduduk Indonesia”, *SitusResmiBPS* :<https://www.bps.go.id> (diakses 9 Agustus 2018)

“Tinjauan”, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online* :<http://kamusbahasaindonesia.org/tinjauan.ac.id> (diakses 12 agustus 2018)

“Kemiskinan”, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online* :<http://kamusbahasaindonesia.org/tinjauan.ac.id> (diakses 6 Mei 2019)

Penyaluran”, Akademik Telkom: Kata Bahasa Indonesia Online :<http://tesaurus.akademitelkom.ac.id/penyaluran.html> (diakses 13 Agustus 2018)

Bulog, “Sekilas Raskin”, *Situs Resmi Bulog*, <http://www.bulog.co.id/sekilasraskinv2.php> (diakses 13 Agustus 2018)

### **Jurnal**

Suparti, Hartutiningsihdan Anwar Alaydrus, “Journal Administrative Reform”, *EvaluasiPelaksanaan Program BerasMiskin (RASKIN) di KecamatanSamarindaUlu, jurnalAministrative Reform*, vol 5 no. 1, (2017), <https://www.ejournal.ar.mian.fisip.ac.id> (Diakses 29 Agustus 2018)

Anita Rahmawaty, “JurnalAministrative Reform”, *Distribusidalam Islam dalamUpayaPemerataanKesejatraanMelaluiKeadilan*, vol. 1, No. 1, (Juni 2013),<https://www.journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/download/198/pdf> (diakses 30 Agustus 2018)

Moh. Holis, “Journal Perbankan Syariah”, *Sistem Distribusi Dalam Perspektif Ekonomi Islam, Journal Perbankan Syariah*, Vol. 1 no. 2, November 2006 ISSN:2527-6344 <https://www.journal.ar.mian.fisip.ac.id> (Di akses 7 Juni 2019)

### **Skripsi**

Musdalifa, “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penyaluran Bantuan Raskin di Kelurahan Silae Kecamatan Ulujadi”, Skripsi tidak diterbitkan (Palu : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu, 2015).

Defit Sulistiyowati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Upah Dalam Implementasi Kebijakan Program Penyaluran Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) Di Desa Glodog Kecamatan Palang Kabupaten Tuban”, Skripsi tidak diterbitkan, (Surabaya : Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2011).

Winria Pitapurwati, “Pelaksanaan Penyaluran Raskin Di Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa”, Skripsi tidak diterbitkan, (Makassar :Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Administrasi Negara Universitas Hasanudin, 2014).

Hikmah Munthe, “Evaluasi Program Beras Miskin (Raskin) dilingkungan Kelurahan Sitirejo 1 Kecamatan Medan Kota”, Skripsi tidak diterbitkan, (Medan : Universitas Sumatera Utara , 2009).

### **Dokumen**

Dokumen, Kantor Desa Rarampadende Kecamatan Dolo Barat Kabupaten Sigi, (tanggal 10 Agustus 2018).

## DOKUMENTASI PENELITIAN



Dokumentasi dan Pengambilan data dengan Bapak Abdul Afif, S.Kom, selaku Kaur Keuangan/Operator Desa Rarampadende, Tanggal 1 April 2019



Wawancara dengan Ibu Hilda, Selaku Panitia Penyaluran Raskin/ Kaur TU dan umum Desa Rarampadende, Tanggal 1 April 2019



Saat Wawancara dengan Ibu Jati, Selaku Penerima Raskin, Tanggal 7 Februari 2019



Saat Wawancara dengan Ibu Gusni, Selaku Penerima Raskin, Tanggal 7 Februari 2019

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### A. Identitas Diri

Nama : Sri Wahyuni  
TTL : Rarampadende, 13 Februari 1996  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Status : Belum Menikah  
Anak Ke : 2 dari 4 Bersaudara  
Alamat : Rarampadende

### B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Mustamin  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Rarampadende

Nama Ibu : Jerni  
Pekerjaan : URT  
Alamat : Rarampadende

### C. Jenjang Pendidikan

1. SDN Rarampadende Kec. Dolo Barat Kab. Sigi Tamat Tahun 2008.
2. SMPN 5 Dolo Kec. Dolo Barat Kab. Sigi Tamat Tahun 2011
3. SMA N 2 Dolo Kec. Dolo Barat Kab. Sigi Tamatan Tahun 2014
4. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi Syariah 2015 dan Menyelesaikan Studi Strata I (SI) Pada Tahun 2019.

Palu, 14 April 2019  
Penulis

Sri Wahyuni  
NIM. 15.3.12.0096